

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, Januari 2026

KEPALA,

SETIYO HARTATO, S.I.P, M.M.B  
NIP 19810314 200604 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika”:

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah Dengan target meningkatnya akses layanan komunikasi dan informatika sebesar 83,24 dan capaian di tahun 2025 sebesar 122,24 maka tujuan sudah tercapai 146,97 persen.

2. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan”:

- Diukur dengan indikator kinerja sasaran yaitu Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika adalah Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika dari bidang informasi dan komunikasi publik dan bidang layanan informatika + Persentase Penerapan Metadata sesuai standar + Persentase Layanan keamanan Informasi dibagi 4 dikali 100%).

$$\begin{aligned} & \frac{133,33\% + 106,06\% + 125\% + 125\%}{4} \\ & = \frac{489,39\%}{4} \\ & = \mathbf{122,34\%} \end{aligned}$$

Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Aplikasi Informatika, Program Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan Program Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

3. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 berdasarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2026 sebesar 83,24%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 122,34%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target :  $122,34 : 83,24 \times 100\%$  mencapai 146,97%.

#### 4. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah

- Diukur dengan indikator Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP tahun 2025.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,75 sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 80,86. Dengan demikian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul belum mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target ( $80,86 : 80,75 \times 100\%$ ) mencapai 100,13%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 80,50 tercapai 80,42 dengan prosentase  $80,42\% : 80,50 \times 100\% = 99,90\%$  terjadi peningkatan sebesar 0,23.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi terbaru harus terus diikuti dan mendorong inovasi di bidang TIK dengan membangun ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi baru dan meningkatkan kolaborasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi
2. Penggunaan teknologi informasi yang masif perlu adanya pemenuhan dukungan sumber daya manusia, kapasitas dan kapabilitas teknologi yang digunakan serta kegiatan operasional TI dengan mengembangkan infrastruktur TIK yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
3. Kesenjangan digital masyarakat harus dijumpai dengan meningkatkan akses internet publik serta meningkatkan literasi digital dimana akses terhadap teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi penyaji dan pengguna sistem informasi
5. Kurangnya kapabilitas sumber daya manusia dalam memantau dan menangani insiden keamanan informasi
6. Kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk aktif menggunakan platform aduan resmi melalui SP4N LAPOR masih kurang.

7. Literasi Digital yang rendah membuat masyarakat kesulitan dalam mengidentifikasi kebenaran informasi sehingga meningkatkan resiko terpapar hoax dan penipuan on line.

## DAFTAR ISI

---

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
DAFTAR GAMBAR .....	7
BAB I _PENDAHULUAN .....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah.....	10
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi .....	12
D. Tugas dan Fungsi .....	15
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) .....	17
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran .....	18
BAB II _PERENCANAAN KINERJA .....	21
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	21
B. Strategi dan Arah Kebijakan .....	23
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	23
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	27
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja .....	30
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA .....	37
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2025 .....	37
B. Capaian Kinerja Lainnya.....	77
C. Efisiensi Anggaran .....	79
D. Inovasi .....	83
BAB IV PENUTUP .....	86
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

---

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	18
Tabel I.2	Sarana-Prasarana .....	19
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025 .....	20
Tabel II.1	Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026..	22
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan .....	23
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	23
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 .....	25
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....	28
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 .....	29
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025 .....	39
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	41
Tabel III.4	Capaian Sasaran .....	41
Tabel III.5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2023 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 .....	421
Tabel III.6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	432
Tabel III.7	Capaian Kinerja Program pada Sasaran.....	43
Tabel III.8	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	45
Tabel III.9	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .....	72
Tabel III.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026 .....	75
Tabel III.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan .....	64
Tabel III.12	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	64
Tabel III.13	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan	
Tabel III.14	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar I.1. Cascading Kinerja .....	11
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.....	12
Gambar II.1 e SAKIP Gunungkidul	22
Gambar II.2 SIPANDA .....	22
Gambar II.3 MRTG	23
Gambar II.4 Aplikasi the Dude	23
Gambar II.5 Aplikasi Elasticsearch...	24
Gambar II.6 Aplikasi SP4N LAPOR .....	24
Gambar II.7 PPID	25
Gambar II.8 Media Sosial Pemkab	25
Gambar II.9 Media Sosial Kominfo ...	26
Gambar II.10 Aplikasi Portal layanan BSrE .....	27
Gambar II.11 Penetration Test BSSN	27
Gambar II.12 Cloud Kominfo.....	28
Gambar II.13 SSL dari DigiCert Global.....	28
Gambar III.1 Piagam penghargaan Anugrah Media Humas Kategori Medsos	36
Gambar III.2 Piagam penghargaan Anugrah Media Humas Kategori Media Audiovisual .....	36
Gambar III.3 Piagam penghargaan keterbukaan informasi publik .....	37
Gambar III.4 Piagam penghargaan kategori best anchor .....	38
Gambar III.5 Pengukuhan KIM .....	38
Gambar III.6 Medsos Kominfo Lapor.go.id .....	39
Gambar III.7 Talkshow Radio .....	39
Gambar III.8 Podcast .....	40
Gambar III.9 Penghargaan Smartcity .....	40
Gambar III.10 Pemeliharaan Jaringan .....	48
Gambar III.11 Perbaikan Jaringan .....	49
Gambar III.12 Pemasangan CCTV .....	50
Gambar III.13 Publikasi Data Statistik .....	50
Gambar III.14 Ekspose Data Statistik .....	53

Gambar III 15 Bimtek Statistik .....	53
Gambar III.15 Ekspose Data Geospasial .....	54
Gambar III 16 Tanda Tangan Elektronik PD .....	54
Gambar III 17 Tanda Tangan Elektronik Kapanewon dan Kalurahan .....	56

## **BAB I berisi:**

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

---

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

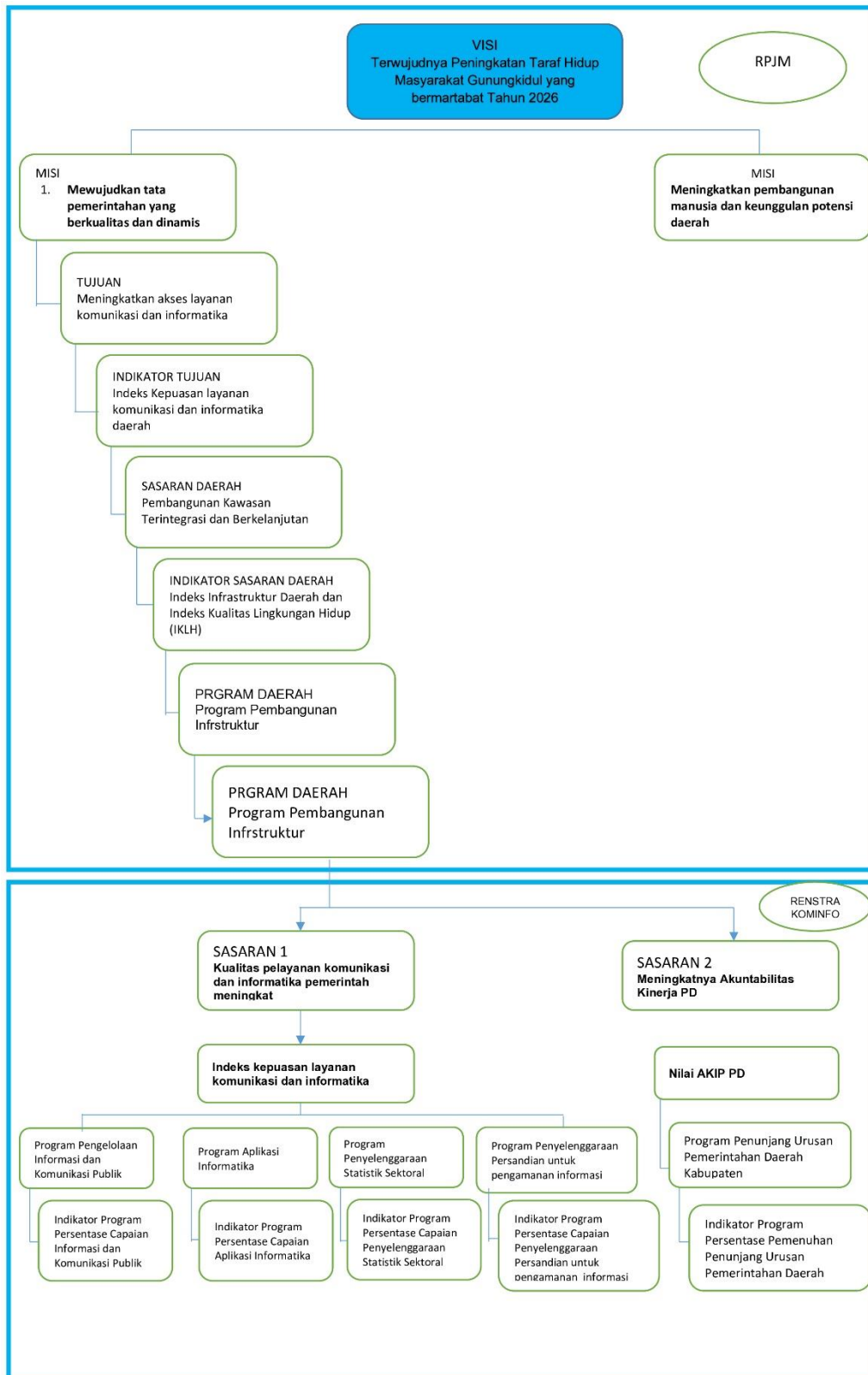
LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

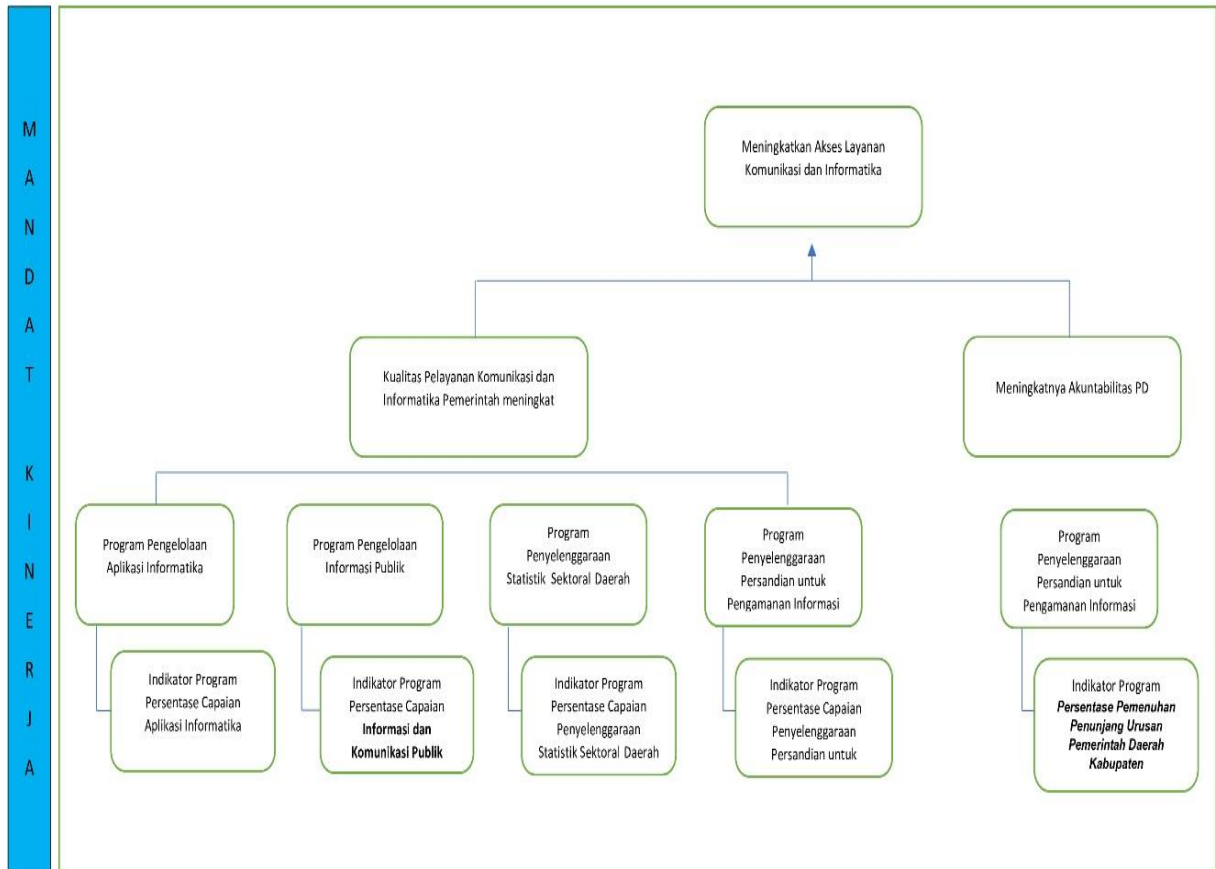
Gambar I.1. Cascading Kinerja

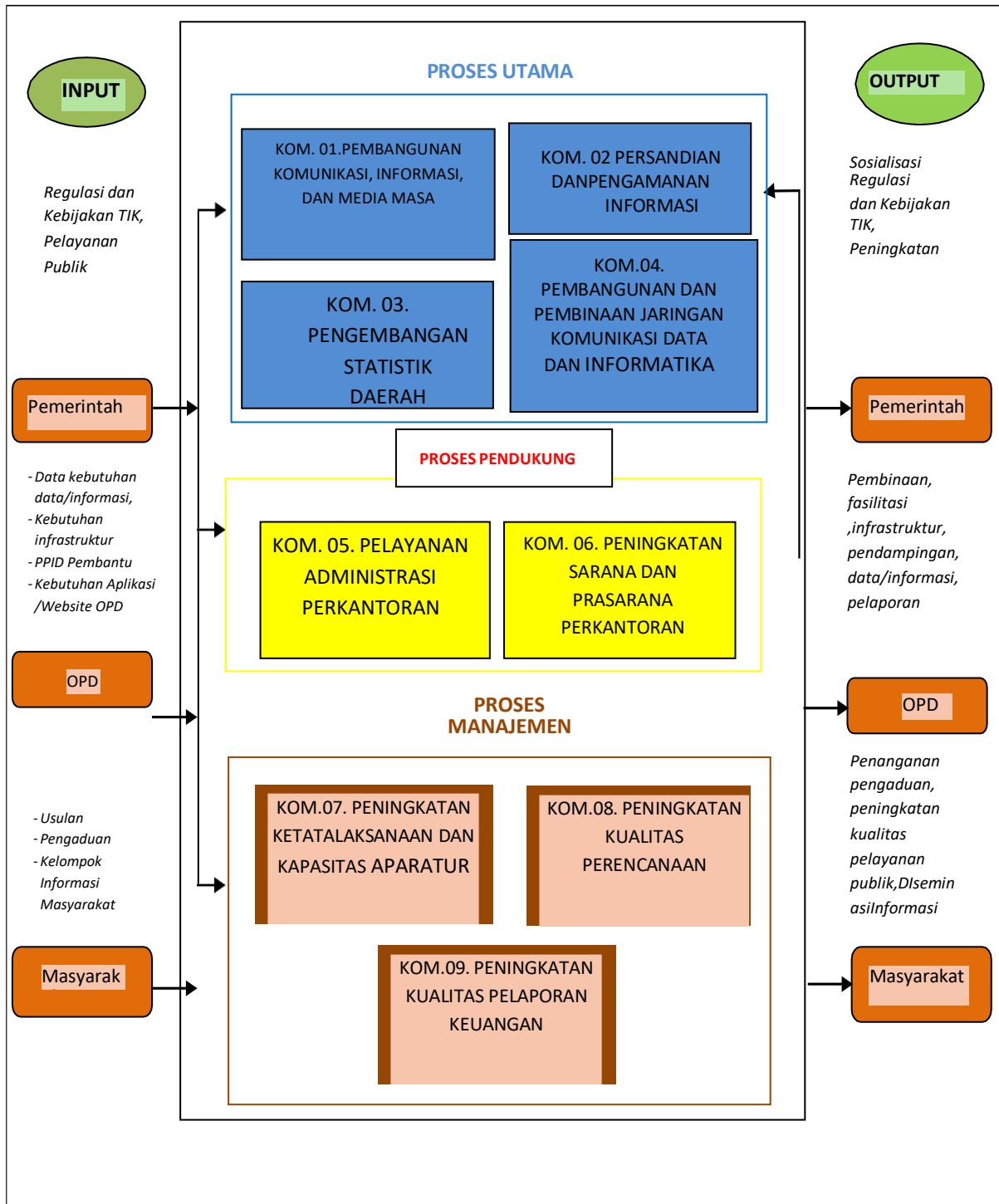


### C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

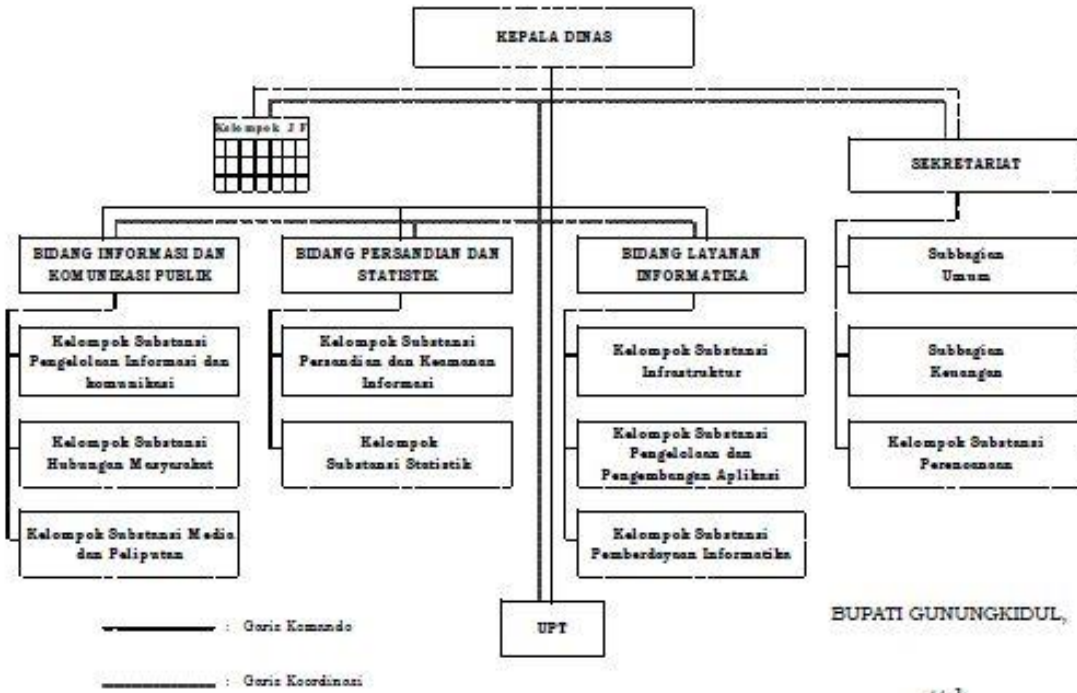
Gambar I.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul





LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
 NOMOR 138 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
 TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

## **D. Tugas dan Fungsi**

---

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

### **1. Tugas Pokok**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- c. Penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- d. Penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah.
- e. Pengembangan kemitraan media.
- f. Penyelenggaraan peliputan.
- g. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- h. Pelaksanaan tata kelola persandian.
- i. Penyelenggaraan operasional pengamanan informasi
- j. Penyelenggaraan statistik daerah.
- k. Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- l. Pengelolaan dan pengembangan aplikasi.
- m. Pemberdayaan informatika.
- n. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.

- o. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah.
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dan
- q. Pengelolaan UPT.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari
  - 1) Sub Bagian Perencanaan;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
  - 2) Seksi Hubungan Masyarakat;
  - 3) Seksi Media dan Peliputan.
- d. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari :
  - 1) Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;
  - 2) Seksi Statistik.
- e. Bidang Layanan Informatika, terdiri dari :
  - 1) Seksi Infrastruktur
  - 2) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi;
  - 3) Seksi Pemberdayaan Informatika.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum,

dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

- 2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kehumasan pemerintah daerah, pengembangan kemitraan media, dan penyelenggaraan peliputan serta pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 3) Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan tata kelola persandian, penyelenggaraan operasional pengamanan informasi, dan penyelenggaraan statistik daerah.
- 4) Bidang Layanan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika.

## **E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

---

Permasalahan Utama/Isu Strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemerataan akses informasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta literasi digital masyarakat.
2. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau Pemerintah Digital (PEMDI) secara terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Masih terbatasnya pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan sumber daya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
4. Belum optimalnya penguatan tata kelola strategi komunikasi publik yang berbasis pada pemberdayaan dan kolaborasi multipihak.
5. Belum optimalnya penguatan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi, seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman kebocoran data dan serangan siber di era digital
6. Masih perlunya peningkatan literasi digital masyarakat serta pemberdayaan komunitas informasi dalam mendukung transformasi digital daerah.

## F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	1	0	0	0	1	1	0			1	0
B.	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	4	3	1	0	0	4	3	1	0	0	2	2
	2. Pengawas	2		2			2	0	2			1	1
	3. Pelaksana	18	0	4	5	3	25	0	13	10	2	22	3
C.	Jabatan Fungsional	9	0	9	0	0	2	0	2	0	0	1	1
	Jumlah	34	5	15	5	3	34	4	18	10	2	27	7

Sumber: Subbagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 18 orang (41,17%) , disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 4 orang (11,76%), D3 sebanyak 10 orang (29,41%), SLTA sebanyak 2 orang (17,46%).

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki laki sejumlah 27 orang, lebih banyak dibanding pegawai perempuan yaitu sejumlah 7 pegawai perempuan. Keberadaan pegawai dengan jenis kelamin perempuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, memang lebih sedikit daripada jumlah pegawai laki-laki, meski demikian dari 7 pegawai Perempuan, 2 orang menduduki jabatan eselon 3, dan 2 lainnya menduduki jabatan struktural dan fungsional, menunjukkan penerapan sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Sedangkan pegawai Perempuan yang lain, aktif dalam mengelola media komunikasi milik Dinas Komunikasi dan Informatika, misalnya menjadi penyiar radio, talent konten medsos sekaligus sebagai penyunting dan pengarah program.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif. Terdapat satu unit kerja eselon IV yakni Pranata Komputer Kelompok Substansi Jaringan yang menangani 2 (dua) sub dan 2 (dua) kegiatan tetapi hanya didukung 1 (satu) orang PNS dan beberapa Tenaga Harian Lepas. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai penyedia layanan jaringan.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
1	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	20 unit	1.226.098.395
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	596 unit	3.344.162.781
3	Alat-alat Studio dan Komunikasi	203 unit	3.825.631.102
4	Komputer	324 unit	11.067.283.791
1	Aset Tetap Lainnya		
	Buku Perpustakaan	5 buku	750.000
	Jumlah		19.463.926.069

Sumber: Laporan Keuangan Lampiran SIM Aset 31 Desember 2025  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul (Unaudited)

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 5 (lima) unit kendaraan operasional, dan 13 (tiga belas) unit kendaraan roda dua.

Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola (menyatu dengan mushola kompleks Setda), ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1, namun beberapa computer/laptop dalam kondisi yang tidak optimal. Dengan demikian meski ketersediaan sarana dan prasarana dalam jumlah yang cukup akan tetapi tidak dapat dipergunakan secara optimal. Untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan dalam Penyelenggaraan Publik, Dinas Kominfo telah menyediakan toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan, ruang lakstasi dan ruang rokok khusus (menyatu dengan Gedung BKAD) serta lift yang menyatu dengan Gedung Sekretariat Daerah.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.820.000	2.820.000	0
4	1	02	Retribusi Daerah	2.820.000	2.820.000	0
Jumlah Pendapatan				2.820.000	2.820.000	0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	19.370.385.450	17.320.427.714	2.049.957.736
5	1	01	Belanja Pegawai	3.288.432.282	2.336.819.810	951.912.472
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	16.081.953.168	14.983.907.904	1.098.045.264
5	1	05	Belanja Hibah	0	0	0
5	2		BELANJA MODAL	1.653.000.000	1.640.904.000	(12.096.000)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.108.000.000	1.350.904.000	242.904.000
5	2	03	Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi	0	0	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	545.000.000	290.000.000	(256.000.000)
Jumlah Belanja				21.023.385.450	18.961.331.714	(2.037.861.736)
Total Surplus/(Defisit)				(21.023.385.450)	(18.961.331.714)	(2.037.861.736)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				0	0	0
Pembiayaan Neto				0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul semula Rp 21.023.385.450 dan mengalami perubahan menjadi Rp 18.961.331.714 atau berkurang Rp 2.037.861.736. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dalam bentuk Refocusing dan realokasi anggaran sebagai bentuk dukungan penyesuaian struktur APBD untuk memenuhi belanja wajib yang ditetapkan.

## **BAB II berisi:**

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dokumen teknis operasional.

### **A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul berperan dalam mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, khususnya pada agenda “Pembangunan Kawasan Terintegrasi dan Berkelanjutan” yang diimplementasikan melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan layanan komunikasi dan informatika, transformasi digital dan kualitas pelayanan publik.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021–2026 ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan, yaitu “Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika.” Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah, dengan target akhir periode Renstra Tahun 2026 sebesar 91,25.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran jangka menengah perangkat daerah yang merupakan kondisi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan, yang diukur melalui:

- Persentase pelayanan komunikasi dan informatika;
  - Persentase penerapan metadata sesuai standar
  - Persentase layanan keamanan informasi.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah..

Adapun tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1 Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintahan	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika	Persen	na	42,87	55,28	69,26	83,24	91,25	91,25
1.1	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	Persentase pelayanan komunikasi dan informatika	Persen	na	83,62	85,84	87,78	89,72	91,67	91,67
		Persentase penerapan metadata sesuai standar	Persen		20	40	60	80	100	100
		Persentase Layanan Keamanan Informasi	Persen		25	40	60	80	90	90
1.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	na	80,10	80,25	80,50	80,75	81,00	81,00

Sumber : Renstra 2021-2026

Tujuan Perangkat Daerah (PD) merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan pengukurannya ditetapkan pada akhir periode RPJMD. Namun demikian, dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja dan memastikan ketercapaian tujuan secara bertahap, indikator tujuan tersebut tetap dijabarkan ke dalam target tahunan pada dokumen Perjanjian Kinerja. Target tahunan ini berfungsi sebagai milestone atau tahapan antara (*intermediate target*) yang menunjukkan progres pencapaian menuju target akhir RPJMD.

## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika daerah meningkat	Meningkatkan infrastruktur TIK dan pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan e-government dan pelayanan publik	<b>Pengembangan aplikasi dan perluasan jaringan bandwidth</b>
2.	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika daerah meningkat	Meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi	<b>Peningkatan Kapasitas Layanan Penyebaran Informasi</b>
3.	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika daerah meningkat	Mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah	<b>Pelaksanaan Satu Data Indonesia</b>
4.	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika daerah meningkat	Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan pengamanan informasi bagi OPD	<b>Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD</b>
5	Meningkatkan akuntabilitas Kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP	<b>Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD</b>

## C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.112.144.200	1.889.958.200	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.112.144.200	1.889.958.200	(222.186.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Relasi Media	605.820.000	497.420.000	(108.400.000)
	Pelayanan Informasi Publik	92.875.000	67.410.000	(25.465.000)
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.121.000.000	1.024.524.000	(96.476.000)
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	292.449.200	300.604.200	8.155.000
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	12.998.560.000	12.686.898.000	(311.662.000)
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.998.560.000	12.686.898.000	(311.662.000)
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1.393.100.000	1.189.600.000	(203.500.000)
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	114.900.000	196.294.000	81.394.000
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	11.485.560.000	11.301.004.000	(184.556.000)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	140.520.000	119.732.000	(20.788.000)
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	140.520.000	119.732.000	(20.788.000)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	10.940.000	10.940.000	0
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	129.580.000	108.792.000	(20.788.000)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	352.130.000	343.507.000	(8.623.000)
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	248.330.000	240.602.000	(7.728.000)
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhandan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39.050.000	36.080.000	(2.970.000)
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	15.000.000	13.792.000	(1.208.000)
	Penyediaan Layanan KeamananInformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	194.280.000	190.730.000	(3.550.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	103.800.000	102.905.000	(895.000)
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	103.800.000	102.905.000	(895.000)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	0	0	0
	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0	0	0
	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	0	0	0
	<b>Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran</b>	<b>16.103.354.200</b>	<b>15.021.415.200</b>	<b>(1.081.939.000)</b>

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

asasan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.920.031.250	3.939.916.514	(980.114.736)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.749.500	4.456.500	(2.293.000)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.999.800	1.205.000	(1.794.800)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	499.900	326.000	(173.900)
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	250.000	209.000	(41.000)
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	499.900	446.000	(53.900)
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	250.000	209.000	(41.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.500.000	1.407.000	(93.000)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	749.900	654.000	(95.500)
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.295.632.282	2.342.981.810	(952.650.472)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.288.432.282	2.336.519.810	(951.912.472)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.200.000	1.070.000	(130.000)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.000.000	5.392.000	(608.000)
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52.286.000	74.915.673	22.629.673
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	32.286.173	34.915.673	2.629.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	40.000.000	20.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	478.711.295	367.451.995	(111.259.300)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.467.495	12.467.495	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.717.000	31.625.000	(1.092.000)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.404.800	22.857.500	(2.547.300)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	8.040.000	600.000
	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.750.000	8.750.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	391.932.000	283.712.000	(108.220.000)

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.000.000	294.400.000	86.400.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.000.000	294.400.000	86.400.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.578.400	523.356.936	25.778.536
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	403.191.600	428.770.136	25.578.536
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.386.800	94.586.800	(94.386.800)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.073.600	332.353.600	(48.720.000)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.700.000	204.700.000	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.500.000	18.500.000	(30.000.000)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.873.600	109.153.600	(18.720.000)
	Total Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran	4.920.031.250	3.939.916.514	(980.114.736)

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025*

#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

---

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Pada Tahun 2025, terdapat penyesuaian indikator kinerja melalui penambahan indikator Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah. Penambahan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas catatan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Tahun 2024. Penambahan indikator ini bertujuan untuk memperkuat pengukuran kualitas layanan serta memastikan keterkaitan yang lebih jelas antara sasaran strategis dan hasil (outcome) yang dicapai.

Hasil tindak lanjut atas LHE Kemenpan ini selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 dan digunakan sebagai dasar penetapan indikator pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.

Sebagai konsekuensi dari penyesuaian tersebut, indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat perbedaan dengan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra. Penyempurnaan ini dilakukan untuk meningkatkan orientasi pengukuran kinerja berbasis outcome serta mengakomodasi rekomendasi hasil evaluasi.

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	Indeks	83,24

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	persen	89,72
		Persentase penerapan metadata sesuai standar	persen	80
		Persentase layanan keamanan informasi	persen	80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	skor	80,75

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 mengalami 2 (dua) kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, Adapun kondisi yang menyebabkan dilakukannya perubahan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pergantian Kepala Daerah
2. Terjadinya perubahan anggaran, yang mempengaruhi strategi pelaksanaan program dan kegiatan,

Perubahan Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang mengatur bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi pergantian pejabat, perubahan strategi, perubahan

program/kegiatan dan alokasi anggaran, maupun perubahan prioritas yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi, relevansi, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	Indeks	83,24

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	Indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah*	persen	89,72
		Persentase penerapan metadata sesuai standar	persen	80
		Persentase layanan keamanan informasi	persen	80
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	skor	80,75

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

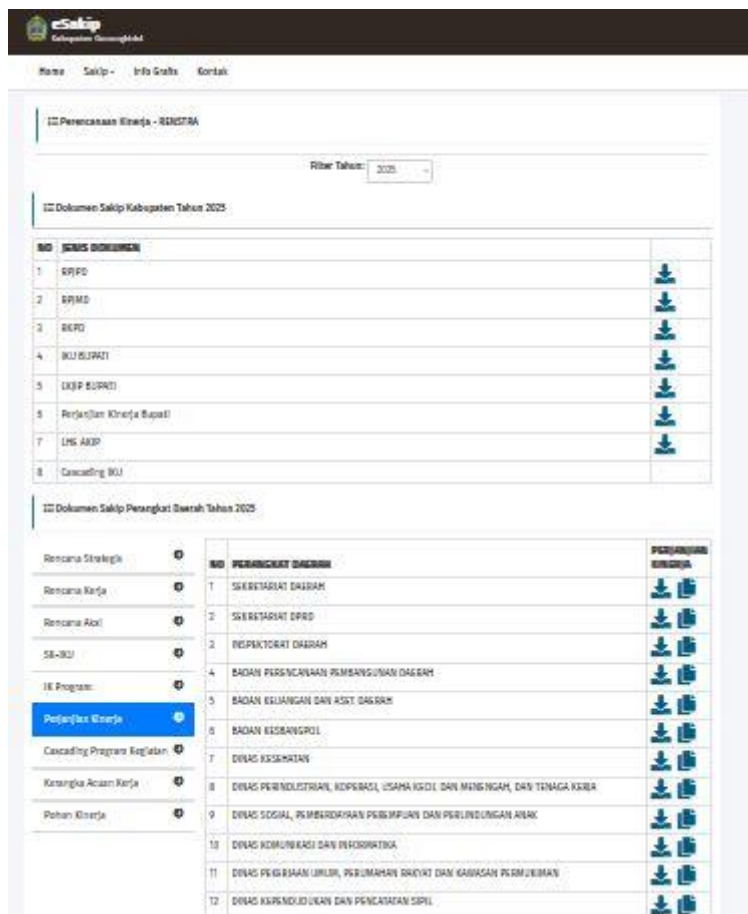
Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.907.958.200	APBD
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.650.218.000	APBD
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	119.732.000	APBD
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	343.507.000	APBD
Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	0	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.939.916.514	APBD

Keterangan Tambahan:

1. Sesuai Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 indikator tujuan dan sasaran mempunyai rumus perhitungan yang berbeda sehingga target yang ditetapkan berbeda.
2. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 6,71% sehubungan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat dan realokasi anggaran untuk memenuhi urusan wajib yang telah ditetapkan.
3. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
4. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga
5. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

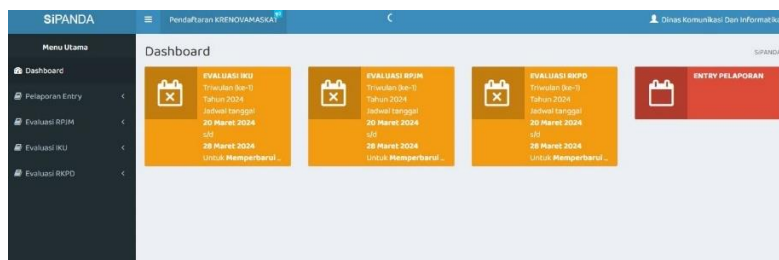
## E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

### 1. Aplikasi e Sakip Gunungkidul



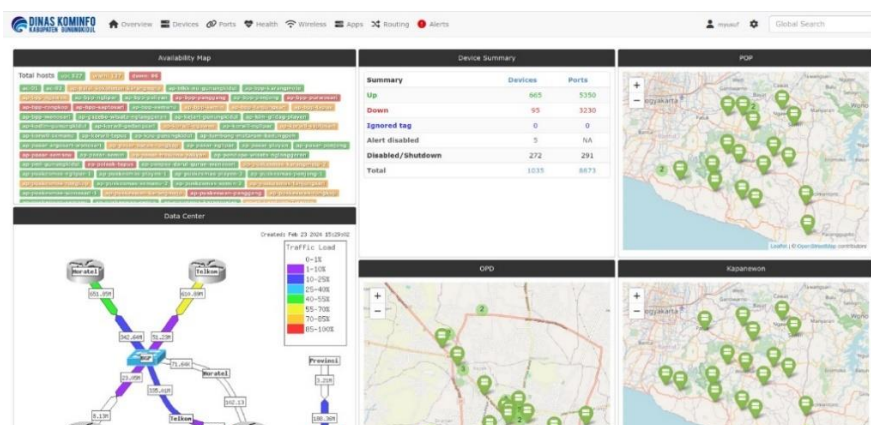
Gambar II.1. eSAKIP GUNUNGKIDUL

## 2. Aplikasi Pengendalian Pembangunan SIPANDA



Gambar II.2. SIPANDA

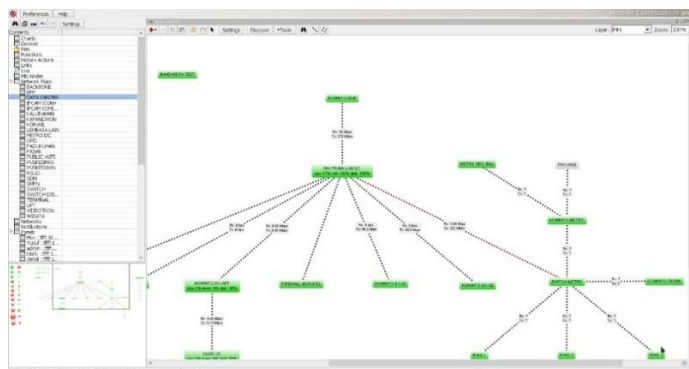
## 3. Instrumen pendukung Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data aplikasi MRTG (<https://mrtg-kominfo.gunungkidulkab.go.id/>)



Sumber : <https://mrtg-kominfo.gunungkidulkab.go.id/>

Gambar II.3. MRTG

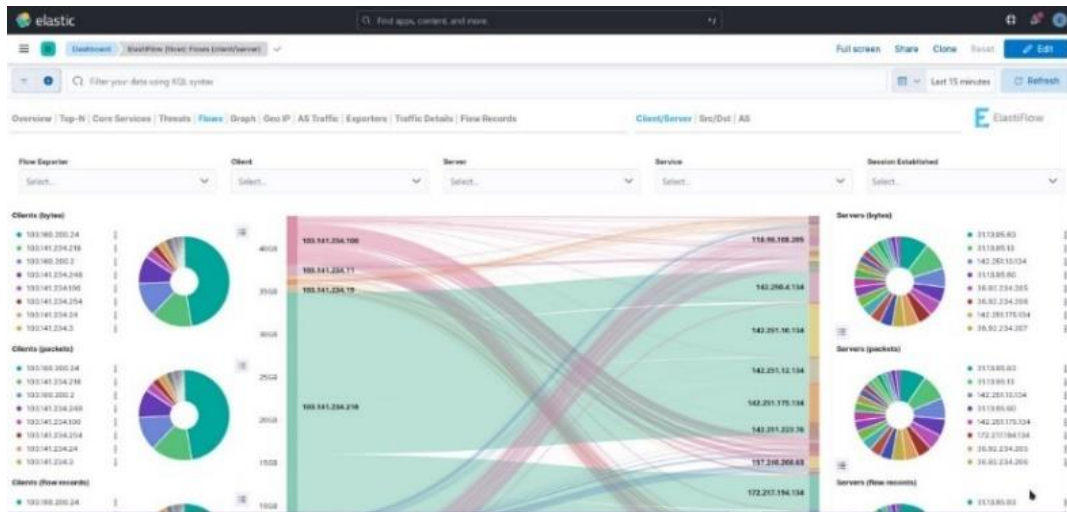
## 4. Aplikasi The Dude merupakan aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk pemantauan jaringan.



Sumber: Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo

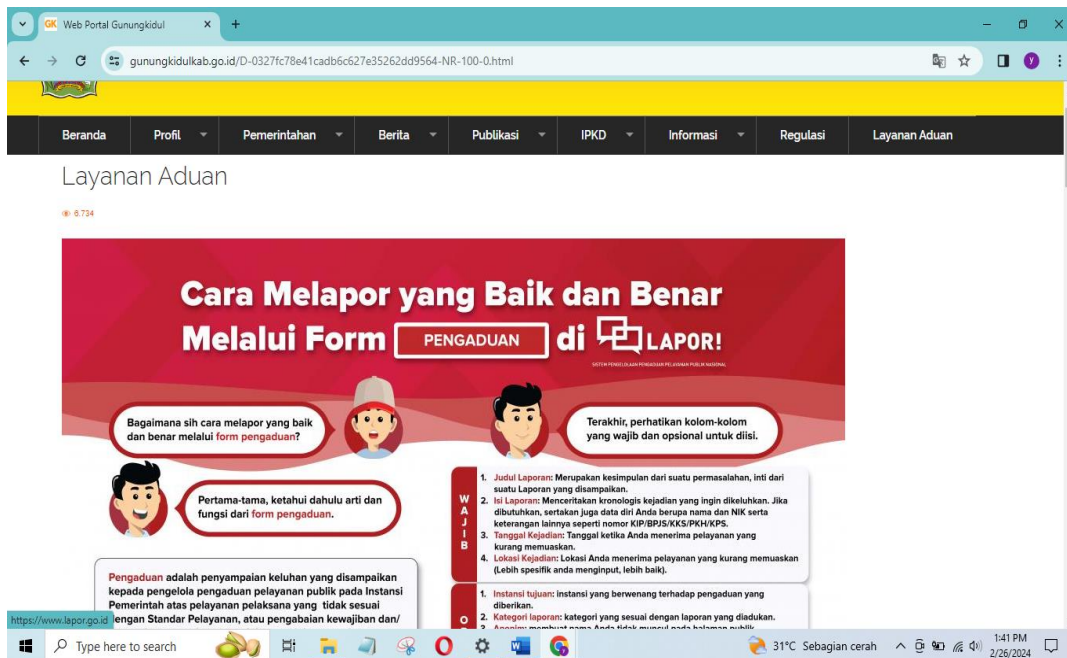
Gambar II.4. Aplikasi The Dude

5. Aplikasi *Elasticsearch* merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring flow paket jaringan.



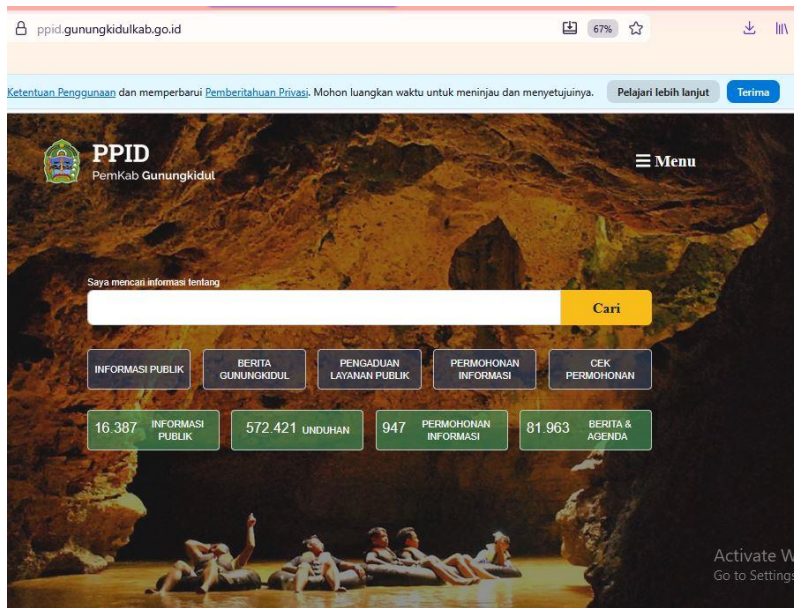
Sumber: Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo  
Gambar II.5. Aplikasi *Elasticsearch*

6. Instrumen pendukung Capaian Kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah aplikasi *SP4NLAPOR* ([lapor.go.id](http://lapor.go.id))



Sumber: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo  
Gambar II.6. Aplikasi *SP4NLAPOR*

7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)  
<https://ppid.gunungkidulkab.go.id/>



Gambar II.7. PPID

Pengelolaan Media Sosial Pemkab



Gambar II.8. 1. Instagram Pemkab Gunungkidul



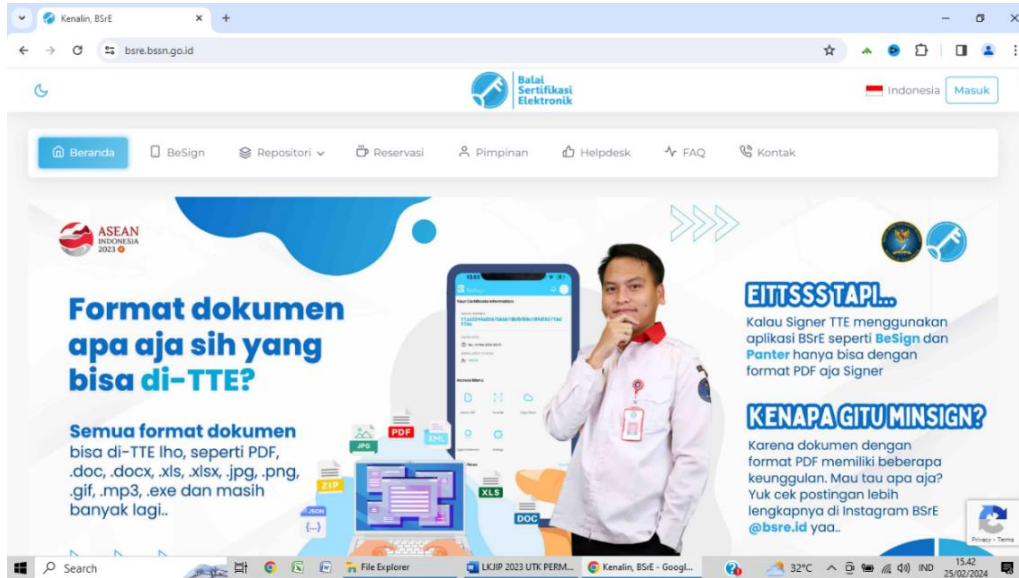
Gambar II.8. 2. Instagram Dhaksinarga FM (LPPL Radio Milik Pemkab Gunungkidul)

8. Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)  
 SALAH SATU CONTOH MEDIA SOSIAL KIM PADUKUHAN



Gambar II.9. Media Sosial KIM

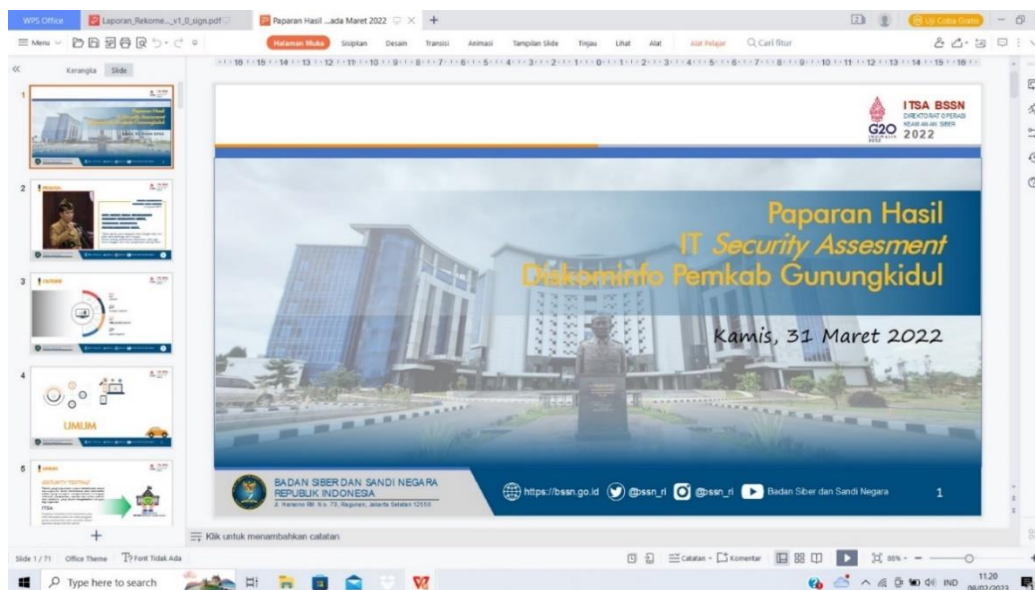
9. Instrumen pendukung penerapan Penerbitan Sertifikat Eletronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *Portal Layanan BSrE* ([portal-bsre.bssn.go.id](http://portal-bsre.bssn.go.id))



Sumber : Balai Sertifikat Elektronik BSSN RI  
Gambar II.1. Portal Layanan BSrE

Gambar II.10. aplikasi *Portal Layanan BSrE*

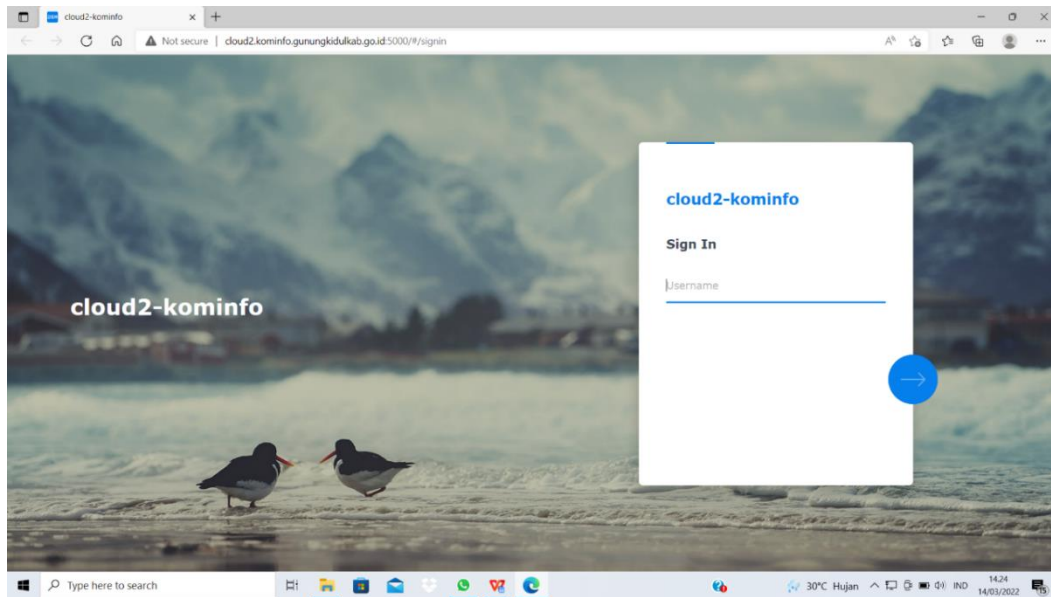
10. Instrumen pendukung penerapan Penetration Test di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah Aplikasi dibantu pihak BSSN RI



Sumber : Badan Siber dan Sandi Negara RI

Gambar II.11. Penetration Test BSSN

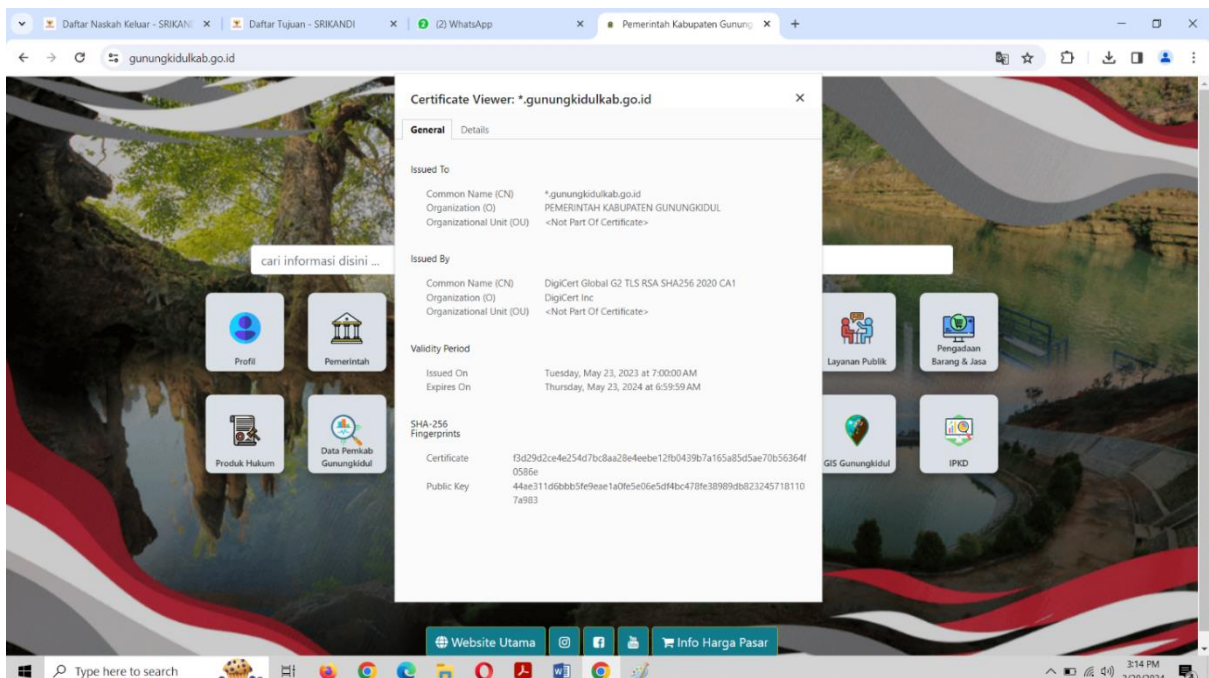
11. Instrumen pendukung penerapan Pengamanan dan Kirim Terima Berita Aplikasi cloud2-kominfo (cloud2.kominfo.gunungkidulkab.go.id)



Sumber:.....

Gambar II.12. cloud2-kominfo

12. Penggunaan SSL dari Digicert Global (gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.13. SSL dari Digicert Global (gunungkidulkab.go.id)

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Realisasi Anggaran
- D. Inovasi

## A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 penghitungan tujuan dan sasaran menggunakan rumusan sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4
1	Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika	Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah dihitung berdasarkan hasil rata rata capaian dari:

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4
			1. Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika 2. Persentase penerapan metadata sesuai standar 3. Persentase layanan keamanan informasi  Rumus $\frac{\text{Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika} + \text{Persentase penerapan metadata sesuai standar} + \text{Persentase layanan keamanan informasi}}{3}$
2.	Kualitas pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkat	Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah	Rumus: Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah dihitung berdasarkan hasil rata rata capaian dari Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika Dihitung dari: $\frac{\text{Unsur 1} + \text{Unsur 2} + \text{Unsur 3}}{3}$ Unsur 1 : Bidang Layanan Informatika Unsur 2 : Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika Unsur 3 : Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
		Persentase penerapan metadata sesuai standar	Persentase penerapan metadata sesuai standar dihitung dengan menggunakan rumus:  $\frac{\text{Jumlah OPD yang menerapkan metadata}}{\text{Jumlah OPD seluruhnya}} \times 100\%$
		Persentase layanan keamanan informasi	Persentase layanan keamanan informasi dihitung dengan menggunakan rumus:  $\frac{\text{Jumlah OPD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website yang menerima layanan keamanan informasi}}{\text{Jumlah OPD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website}} \times 100\%$

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi Penghitungan
1	2	3	4
3.	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun n-1.</p> <p>Dasar Pengukuran adalah PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kinerja bobot 30%;</li> <li>2. Pengukuran kinerja bobot 30%;</li> <li>3. Pelaporan Kinerja bobot 15%;</li> <li>4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%.</li> </ol>

Hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2023	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025			KRITERIA/ KODE	TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALI SASI	PERSEN TASE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika	indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	Indeks	156,30	140,29	83,24	101,01	121,35	Sangat Tinggi	91,67
1.1	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat	indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	Indeks	241,325	100	89,72	103,03	114,83	Sangat Tinggi	-
		<u>Meta Indikator:</u> 1. Persentase penerapan metadata sesuai standar	Persentase	100	100	80	100	125	Sangat tinggi	100
		2. Persentase layanan keamanan informatika	Persentase	42,55	100	80	100	125	Sangat Tinggi	90
2	<b>Akuntabilitas kinerja PD Meningkat</b>	Nilai AKIP PD	skor	80,42	80,86	80,75	80,86	100,14	Predikat BB	79,93

Adapun analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

## 1. Capaian Tujuan Meningkatkan Akses Layanan Komunikasi dan Informatika

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 adalah meningkatkan akses layanan komunikasi dan informatika, yang diukur melalui indikator Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah. Indikator tersebut dihitung berdasarkan rata-rata capaian dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika;
2. Persentase penerapan metadana sesuai standar; dan
3. Persentase layanan keamanan informasi.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, capaian masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

- Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika sebesar 103,03%

Realisasi ini diperoleh dari rata-rata realisasi persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika sebesar 106,06% dan persentase PD yang memiliki layanan Informasi yang dikelola secara aktif 100%.

- Persentase penerapan metadana sesuai standar sebesar 100%
- Persentase layanan keamanan informasi sebesar 100%

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Daerah diperoleh dari hasil penjumlahan ketiga komponen tersebut yang kemudian dibagi tiga, sehingga menghasilkan capaian sebesar 101,01%.

Pencapaian tujuan ini tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan sasaran strategis yang mendukungnya, sebagaimana diuraikan berikut.

### Capaian Sasaran Strategis

#### a. Sasaran 1: *Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan informatika Pemerintahan*

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator:

1. Persentase pelayanan komunikasi dan informatika;
2. Persentase penerapan metadana sesuai standar;
3. Persentase layanan keamanan informasi.

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1:** Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

**Tabel III.4 Capaian Sasaran  
Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan**

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat	indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	89,72	103,03	114,83	Sangat Tinggi
	Persentase penerapan metadata sesuai standar	80	100	125	Sangat tinggi
	Persentase layanan keamanan informatika	80	100	125	Sangat Tinggi

Pada Tahun 2025, sasaran “Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan” menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan seluruh indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

Indikator Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah ditargetkan sebesar 89,72 dan terealisasi sebesar 103,03, sehingga mencapai 114,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan berada jauh di atas target yang direncanakan, mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan yang signifikan.

Indikator Persentase Penerapan Metadata Sesuai Standar ditargetkan sebesar 80% dan terealisasi 100%, dengan capaian 125%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh unit yang menjadi sasaran telah menerapkan metadata sesuai standar, melampaui target yang ditetapkan.

Demikian pula pada indikator Persentase Layanan Keamanan Informatika, dari target 80% terealisasi 100% dengan capaian 125%. Hal ini menunjukkan penguatan tata kelola dan implementasi keamanan informatika telah berjalan optimal.

Secara keseluruhan, capaian ketiga indikator tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah pada Tahun 2025 berada pada kategori sangat berhasil dan melampaui ekspektasi kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja Tahun 2025, belum tersedia data pembandingan (*benchmarking*) baik dengan pemerintah daerah lain maupun dengan capaian tingkat nasional. Keterbatasan ini disebabkan belum adanya publikasi data yang sejenis, perbedaan metodologi pengukuran, serta belum terintegrasinya sistem pelaporan antar daerah pada indikator yang sama.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, 2023 dan tahun 2024, dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat	indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	96,75	100,97	241,32	<b>140,29</b>	<b>115,96</b>	<b>93,89</b>	<b>115,96</b>
	Persentase penerapan metadata sesuai standar	81,82	21,27	42,55	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Persentase layanan keamanan informatika	96,69	88,90	100	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Dalam mencapai sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatik didukung dengan beberapa program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Publik;
2. Program Penyelenggaraan Aplikasi Informatika.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\sum \text{PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif}}{\text{Jumlah PD yang memiliki layanan informasi}} \times 100$
		<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika	$\frac{\sum \text{Unsur 1} + \text{Unsur 2}}{2}$ Unsur 1 : $\frac{\sum \text{layanan gangguan jaringan komunikasi darat}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$ Unsur 2 : $\frac{\sum \text{Layanan Informatika}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$
		<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	Persentase Penerapan Metadata yang sesuai Standar	$\frac{\sum \text{PD yang menerapkan Metadata}}{\sum \text{Seluruh PD}} \times 100$
		<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	Persentase Layanan Keamanan Informasi	$\frac{\sum \text{PD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website yang menerima layanan keamanan informasi}}{\sum \text{PD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website}} \times 100$

Pada Tahun 2025, sasaran “Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkat” menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah mencapai 115,96%, yang mengindikasikan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian sasaran tersebut didukung oleh kinerja dua program utama, yaitu:

Tabel III.7 Capaian Kinerja Program

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika pemerintah meningkat	indeks kepuasan layanan komunikasi dan informatika pemerintah	115,96	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persentase PD yang memiliki layanan informasi yang dikelola secara aktif	75	100	133,33 Sangat Tinggi
			Program Capaian Aplikasi Informatika	persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika	99,59	106,06	106,5 Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator Program					87,295	103.03	119,92% Sangat Tinggi

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dengan indikator persentase PD yang memiliki layanan informasi yang dikelola secara aktif, ditargetkan sebesar 75% dan terealisasi 100%, sehingga mencapai 133,33% dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah mengelola layanan informasi secara aktif dan optimal.
2. Program Capaian Aplikasi Informatika, melalui indikator persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika, ditargetkan sebesar 99,59% dan terealisasi sebesar 106,06%, sehingga mencapai 106,50% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan jaringan yang melampaui perencanaan.

Adapun analisa capaian kedua program sebagai berikut:

**1. Evaluasi Capaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

- a. Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif  
 Indikator kinerja program persentase PD yang memiliki layanan informasi yang dikelola secara aktif merupakan indikator dari Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Penghitungan realisasi indikator ini adalah persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif dibanding dengan jumlah PD yang memiliki layanan informasi.

**Tabel 3.5**  
**Evaluasi Pencapaian Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025			Kategori
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	
1	Persentase PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif	100	75	100	133,33	Sangat Tinggi

Realisasi sebesar 100% diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemkab Gunungkidul 47 PD dan dari 47 PD tersebut sudah memiliki layanan informasi yang dikelola secara aktif dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{PD yang memiliki Layanan Informasi yang dikelola secara aktif}}{\text{Jumlah PD yang memiliki layanan informasi}} \times 100 \\
 &= \frac{47}{47} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Realisasi kinerja tahun 2025 sudah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100% atau mencapai 133,33% (sangat Tinggi). Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang baik yang mendukung capaian sasaran Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkat. Realisasi sebesar 100% pada tahun 2025 ini sama dengan capaian di tahun 2024, konsistensi capaian kinerja didukung adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kinerja yang mencantumkan jumlah *posting* (unggah)an) berita dalam *website* Perangkat Daerah termasuk salah satu unsur untuk penilaian capaian kinerja. Selain itu pendampingan di semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan kegiatan pemeringkatan Perangkat Daerah yang aktif mengelola website sejak tahun 2021 juga berdampak positif dalam pengelolaan informasi.

Tahun 2025 Penilaian Media Sosial dan Website Perangkat Daerah sudah dapat dilaksanakan kembali seperti pada tahun 2023 tanpa batasan jumlah peserta seperti sebelum terjadinya wabah covid 19.

Sebagai bentuk pengakuan dan bukti keberhasilan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pada tahun 2025, Kabupaten Gunungkidul memperoleh beberapa penghargaan :

- 1) Penghargaan Terbaik I Kategori Audio Visual pada ajang Anugerah Media Humas (AMH) Tahun 2025



Gb. III 1 Piagam Peghargaan Anugrah Media Humas kategori Audio Visual

- 2) Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik



Gb. III.2 Piagam Peghargaan Keterbukaan Informasi Publik

- 3) Piagam 50 (Lima Puluh) Inovasi Terbaik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025



Gb. III.3 Piagam Peghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyebaran informasi antara lain :

1. Bimtek Pengelolaan Medsos Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) se Kapanewon Tanjungsari



Gb. III 4 Bimtek Pengelolaan Medsos KIM se Kapanewon Tanjungsari

2. Penyebaran Informasi melalui media sosial salah satunya lewat Instagram Dinas Kominfo :



Gb. III 5 Media Sosial Kominfo

### 3. Talkshow radio



Gb. III 6 Talkshow Radio

### 4. Podcast dengan berbagai nara sumber



Gb. II 7 Podcast di Radio Swara Dhaksinarga

## 5. Pertunjukan Rakyat



Gb. II 8 Podcast di Radio Swara Dhaksinarga

Dalam melaksanakan program kegiatan selalu ada hal-hal yang harus dikelola agar memberikan hasil yang optimal terhadap upaya pencapaian target sasaran kinerja diantaranya:

Permasalahan :

- (1) Kurangnya SDM pengelola informasi di semua Perangkat Daerah baik secara kualitas maupun kuantitas.
- (2) Penyebaran informasi dari Perangkat Daerah belum optimal
- (3) Masih minimnya dukungan anggaran untuk mengelola informasi

Solusi :

- (1) Mendorong Perangkat Daerah untuk melaksanakan pengelolaan layanan informasi secara aktif.
- (2) Melaksanakan pendampingan secara intensif di semua Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dengan melakukan bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas bagi personil dari Perangkat Daerah.

- (3) Memanfaatkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang mulai akhir tahun 2023 dibentuk di setiap padukuhan, secara lebih optimal
- (4) Memanfaatkan komunitas yang sudah dibentuk diantaranya KOPI (Komunitas Pemuda Informatif), Forum Humas dan Forum RAPI.
- (5) Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

## 2. Evaluasi Capaian Program Aplikasi Informatika

### a. Pengelolaan e gov

Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika merupakan indikator kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Capaian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

**Evaluasi Pencapaian Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

No	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1.	Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika	100 %	99,59	106,06	106,5	Sangat Tinggi

Persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika diperoleh berdasarkan rumus :

$$\frac{\sum \text{Unsur 1} + \text{Unsur 2}}{2}$$

Unsur 1 :

$$\frac{\sum \text{layanan gangguan jaringan komunikasi darat}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$$

Unsur 2 :

$$\frac{\sum \text{Layanan Informatika}}{\text{Jumlah Lembaga}} \times 100$$

Dengan perhitungan per unsur sebagai berikut:

Unsur 1 =

$$\frac{\sum \text{layanan gangguan jaringan komunikasi darat}}{\text{Jumlah Lembaga}} = 736$$

$$\text{Jumlah Lembaga} = 404$$

$$= ( 736 / 404 ) \times 100$$

$$= 182.18 \%$$

Unsur 2 :  
 $\Sigma$  Layanan Informatika = 121  
Jumlah Lembaga = 404

$$= ( 121 / 404 ) \times 100$$
$$= 29.95 \%$$

Realisasi gangguan jaringan + Realisasi gangguan Aplikasi	X 100
2	

Realisasi =

$$= (( 182.18 + 29.95 ) / 2 ) \times 100$$
$$= 106.06 \%$$

Evaluasi capaian program dengan realisasi indikator persentase peningkatan kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika yang dicapai sebesar 106.06% adalah sebagai berikut:

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2024, realisasi indikator ini telah mencapai 100%. Memasuki Tahun 2025, ditetapkan target sebesar 99,59% dengan mempertimbangkan stabilitas layanan dan upaya pemeliharaan kualitas jaringan. Realisasi Tahun 2025 mencapai 106,06%, sehingga capaian kinerja sebesar 106,50% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan jaringan komunikasi data dan informatika tidak hanya mampu dipertahankan, tetapi juga mengalami peningkatan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada tahun 2024 tidak banyak terjadi gangguan jaringan dan dapat diselesaikan seluruhnya. Selain itu meskipun Covid-19 sudah menjadi endemi akan tetapi kebiasaan memanfaatkan koneksi internet dalam kegiatan sehari-hari masih tetap dilakukan. Hal ini menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Kondisi tersebut semua membutuhkan internet, dan internet juga membutuhkan infrastruktur telekomunikasi.

Sejak Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah mengimplementasikan program Smart City sebagai bagian dari upaya transformasi tata

kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi.

Pelaksanaan Smart City membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh elemen di Kabupaten Gunungkidul, meliputi pemerintah daerah, pemangku kepentingan (stakeholder), serta masyarakat. Dalam implementasinya, konsep Smart City tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi informatika, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi sebagai enabler pembangunan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Smart City, Dinas Komunikasi dan Informatika memprioritaskan pembangunan dan penguatan infrastruktur jaringan internet. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh OPD di Kabupaten Gunungkidul terhubung dalam jaringan internet/intranet yang terintegrasi, sehingga proses koordinasi, pertukaran data, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pada Tahun 2025, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Smart City tidak dilaksanakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat membanggakan dan menjadi indikator keberhasilan implementasi program.

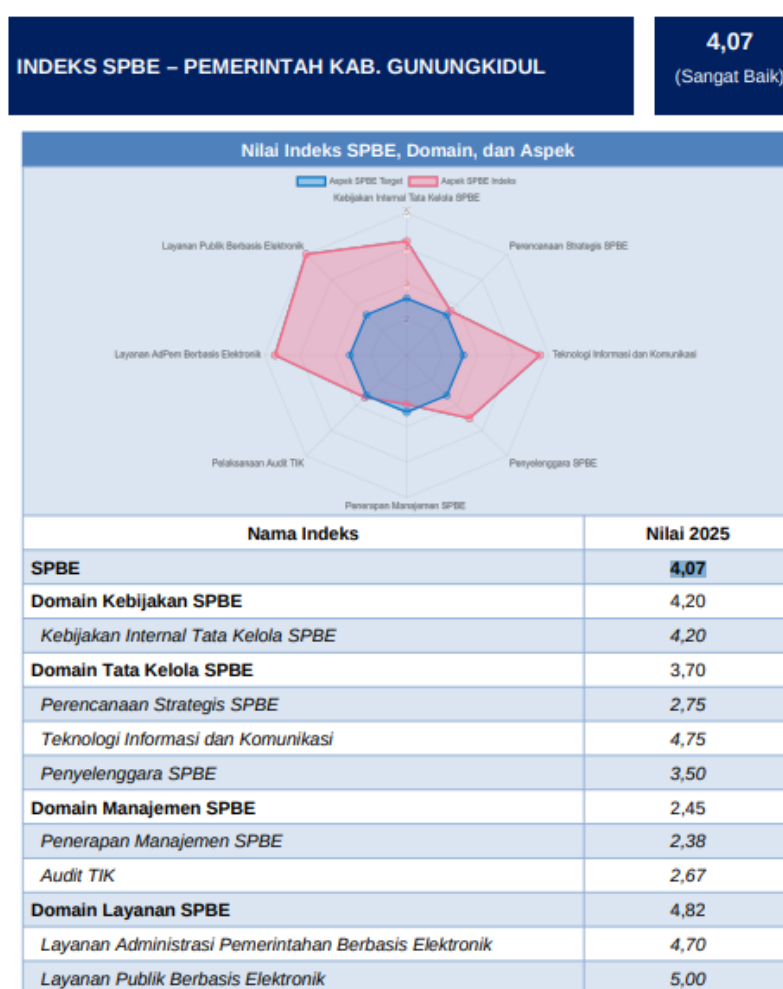
Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul berhasil meraih peringkat ke-3 tingkat nasional dalam Penyelenggaraan Smart City. Selain itu, Kabupaten Gunungkidul juga menempati peringkat pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan nilai 3,81, meningkat dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 3,66. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi Smart City secara konsisten.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mengembangkan inovasi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Dengan demikian, transformasi menuju Smart City tidak hanya menjadi agenda perencanaan, tetapi telah memberikan dampak nyata dalam peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan capaian Smart City, nilai SPBE Kabupaten Gunungkidul juga menunjukkan tren peningkatan. Pada Tahun 2024 nilai SPBE sebesar 3,96 dan

meningkat menjadi 4,07 pada Tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya penguatan dalam aspek tata kelola, manajemen layanan, manajemen data, serta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan meningkatnya nilai SPBE pada Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Gunungkidul berjalan secara konsisten dan terarah. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif terhadap regulasi SPBE, tetapi juga menunjukkan semakin matangnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Smart City yang berkelanjutan.



Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan dan pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan *e-Government* dan implementasi *smartcity* di Kabupaten

Gunungkidul. Infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi dan pemberdayaan informatika menjadi komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan kedua hal tersebut.

Capaian kinerja sasaran Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tidak dapat secara langsung diperbandingkan dengan capaian kinerja nasional, namun demikian sasaran tersebut masuk dalam sasaran strategis nasional yaitu Meningkatnya Cakupan Jaringan Pita Lebar yang Cepat dan Terjangkau dengan Capaian Indikatornya sebesar 70,29%.

Capaian pembangunan Kabupaten Gunungkidul kaitannya dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi**  
**di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2025**

No.	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	Aktifasi Fiber Optik Kapanewon	18	18	18	18	18	18	18	lokasi
2	Jalur Fiber Optik OPD	29	29	29	29	32	32	32	lokasi
3	Integrasi Jaringan Puskesmas ke NOC Kominfo	24	31	31	31	30	30	30	lokasi
4	Jaringan LAN 1000 Mbps	10	18	18	18	32	32	32	PD
5	Upgrade Bandwidth kapanewon 70 Mbps	18	18	18	18	18	18	18	lokasi
6	Tower BPP pertanian	18	18	18	18	18	18	18	lokasi
7	Jaringan data visual IP CCTV	8	44	44	44	108	108	141	lokasi
8	Jaringan transaksi visual teleconference	2	4	4	4	0	0	0	lokasi
9	Backbone Wireless	2	2	2	2	3	3	3	lokasi
10	Aktifasi Backbone Wireless	0	2	2	2	0	0	0	lokasi
11	IPCam Pemantau Jalan	10	20	20	20	49	49	71	lokasi
12	IPCam Pemantau Perbatasan	12	24	24	24	12	12	12	lokasi
13	Pusat Data Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1	1	lokasi
14	Integrasi jaringan kalurahan ke pusat data	77	144	144	144	144	144	144	kalurahan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Capaian pembangunan Kabupaten Gunungkidul kaitannya dengan Aplikasi selengkapnya sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Capaian Pembangunan Aplikasi**  
**di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019-2025**

No.	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	Pembuatan, aktifasi website dan pengelolaan subdomain web Puskesmas	30	31	31	31	31	31	31	website/ domain
2	Pembuatan, aktifasi website dan pengelolaan subdomain web Kapanewon	18	18	18	18	18	18	18	website/ domain
3	Pembuatan, aktifasi website dan pengelolaan subdomain web PD	29	29	29	33	31	31	27	website/ domain
4	Pengelolaan subdomain Sekolah	1838	1838	1838	1838	1985	1985	1918	domain
5	Pengelolaan subdomain Web Kalurahan	144	144	144	144	144	144	144	domain
6	Pengembangan Portal E-Government	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
7	Integrasi Sistem Perencanaan (E-Plan, E-Buggeting, Evaluasi Perencanaan)	1	1	1	1	0	0	1	aplikasi
8	Integrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (SIPP) dengan dengan e-Budgetting (SIPKD)	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
9	Pengembangan E-SAKIP Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
10	Gunungkidul Service BUS	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
11	Integrasi Data Kependudukan & Data Pokok Pendidikan (SIK & DAPODIK)	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
12	Integrasi Data Pajak Daerah dengan Bank (BPD, BNI , BRI syariah) dan Kantor Pos,	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
13	Layanan Map Server Data Geo Spasial	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
14	Layanan Portal Satu Data	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
15	Layanan Media Dashboard	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
16	Layanan Server Surat Elektronik	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
17	Layanan Server Esign (Tanda Tangan Elektronik)	1	1	1	1	1	1	1	aplikasi
18	Layanan Smart Governance	0	0	0	22	22	22	22	Sistem Elektronik
19	Layanan Smart Living	0	0	0	5	5	5	5	Sistem Elektronik
20	Layanan Smart Economy dan Smart society	0	0	0	4	4	4	4	Sistem Elektronik

No.	Capaian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
21	Aplikasi layanan RSUD	0	0	0	1	1	1	1	Aplikasi
22	Domain Voip dan streaming CCTV	0	0	0	3	3	3	5	Sistem Elektronik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Berikut daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul.

**Tabel 3.7**  
Daftar Ketersediaan Infrastruktur TIK di Kabupaten Gunungkidul

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan Broadband Access	32 titik fiber optik OPD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 21 titik fiber optik puskesmas, 2 titik fiber optik RSUD, 3 titik backbone wireless untuk backup
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	30 mbps/kecamatan, bandwidth primary 1400 mbps, bandwidth secondary 1400 mbps, 10 mbps/titik perbatasan, 10 mbps/pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	32 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 19 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 3 Rumdin, 1 LPPL, 72 SD, 34 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan Hotspot untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di OPD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas
6.	Data Center Pemerintah	1 lokasi data center
7.	Data Center Recovery Pemerintah	1 unit Colocation
8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	71 unit CCTV pemantau lalu lintas, 49 unit CCTV keamanan lingkungan, 12 unit CCTV pemantau perbatasan
9.	Server hosting	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICON)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 22 unit VOIP di Lalulintas
11.	Teleconference	1 unit: Endpoint Video Conferencing, 1080 codec, Aver PTZ HD camera 1080, 16x Optical Zoom, units HD mic array (1 mic), P+C H.239, Snapshot Sharing, 2nd monitor, Multipoint 10 sites, Recording USB, Eng rmt.Cables set. NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)
12.	Radio single sideband(SSB)	1 unit server, 19 unit untuk client kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran publik lokal	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, <a href="http://radio.gunungkidulkab.go.id/">http://radio.gunungkidulkab.go.id/</a>

No	Ketersediaan Infrastruktur TIK	Keterangan (jumlah, sebaran, kapasitas, status)
14.	Live streaming package	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	Spectrum analyser	1 unit, digunakan untuk mapping blank spot
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan maintenance darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo

Kemudian yang tak kalah penting selain jaringan adalah ketersediaan Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Sistem informasi yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi 6 kategori aplikasi, antara lain:

- 1) Aplikasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari:
  - a. Sektor Pendidikan
  - b. Sektor Kesehatan
  - c. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Sektor Sosial
  - e. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
  - f. Sektor Tenaga Kerja
  - g. Sektor Pertanahan
  - h. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - i. Sektor Perhubungan
  - j. Sektor Komunikasi dan Informatika
  - k. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - l. Sektor Lingkungan Hidup
  - m. Sektor Kebudayaan
  - n. Sektor Perpustakaan
  - o. Sektor Kearsipan
  - p. Sektor Persandian
  - q. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
  - r. Sektor Penanaman Modal
  - s. Sektor Statistik
  - t. Sektor Pendapatan Daerah
  - u. Sektor Pariwisata
  - v. Sektor Kebencanaan

w. Sektor Perlindungan Perempuan dan Anak

- 2) Administrasi dan Manajemen Umum
- 3) Administrasi legislasi
- 4) Manajemen Pembangunan
- 5) Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, budgeting, e-procurement, e-monitoring)
- 6) Manajemen Kepegawaian

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung oleh satu kegiatan yaitu :

- 1) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung transformasi digital daerah. Namun demikian, dalam ekosistem penyelenggaraan TIK masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi, antara lain:

1. Pemahaman Perangkat Daerah terkait dengan perencanaan, pembangunan dan evaluasi Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memiliki persepsi yang sama
2. Pemanfaatan intranet dan internet yang sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam mendukung kinerja dan pelayanan publik.
3. Belum semua Perangkat Daerah memasukkan unsur TIK ke dalam dokumen perencanaan, sehingga integrasi belum sepenuhnya tercapai.
4. Keterbatasan SDM berbasis TIK, yang berdampak pada kecepatan dan kualitas implementasi program digital.

#### **Solusi pemecahan masalah :**

- 1) Membangun jejaring komunikasi melalui WhatsApp Group dan Telegram Group yang melibatkan unsur perangkat daerah hingga perangkat desa. Kanal ini berfungsi sebagai ruang koordinasi, aduan, dan solusi atas permasalahan pengembangan serta pendayagunaan TIK.
- 2) Menyusun Raperbup tentang Pengelolaan Aset Teknologi dan Informatika, sebagai payung hukum yang memperkuat tata kelola TIK di tingkat daerah.

- 3) Menjalin kerjasama pemanfaatan bersama infrastruktur TIK dengan perangkat daerah terkait, guna mempercepat pembangunan, mempermudah integrasi, dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan teknologi.

Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Aplikasi Informatika antara Lain :

- 1) **Perawatan dan Pengecekan Fungsi Peralatan dalam rangka pemeliharaan jaringan**



Gambar III.8 Perawatan dan Pengecekan Fungsi Peralatan

## 2) Kegiatan Perbaikan Jaringan



Gambar III.9 Perbaikan Jaringan

## 3) Pemasangan CCTV



Gambar III.10 Pemasangan CCTV

### 3. Evaluasi Capaian Metadata sesuai Standar

Persentase penerapan metadata sesuai standar merupakan indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Capaian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Evaluasi Pencapaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024 (%)	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase penerapan metadata sesuai standar	100	80	100	125	Sangat Tinggi	100%	100

Realisasi kinerja tahun 2025 sudah mencapai target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebesar 100% dari target 80% atau tercapai 125% (Sangat Tinggi). Realisasi 100% diperoleh dari persentase perangkat daerah yang menerapkan data dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\sum \text{PD yang menerapkan metadata}}{\sum \text{seluruh PD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{47}{47} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Capaian kinerja pada tahun 2025 sama dibandingkan dengan capaian tahun 2024 disebabkan tahun 2025 merupakan tahun keempat Renstra 2021-2026 dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika yang sama serta sudah dilaksanakan pada hampir semua Perangkat Daerah.

Adapun data Perangkat Daerah yang telah menerapkan Metadata adalah sebagai berikut:

No	Perangkat Daerah
1	SEKRETARIAT DAERAH
2	SEKRETARIAT DPRD
3	INSPEKTORAT DAERAH

4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH
6	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS KESEHATAN
10	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS PENDIDIKAN
12	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PEMUKIMAN
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16	DINAS PARIWISATA
17	DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
18	DINAS PERHUBUNGAN
19	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI UKM, DAN TENAGA KERJA
20	DINAS PERDAGANGAN
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
22	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
24	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
27	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA)
28	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
29	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
30	KAPANEWON WONOSARI
31	KAPANEWON NGLIPAR
32	KAPANEWON PLAYEN
33	KAPANEWON PATUK
34	KAPANEWON PALIYAN
35	KAPANEWON PANGGANG
36	KAPANEWON TEPUS
37	KAPANEWON SEMANU
38	KAPANEWON KARANGMOJO
39	KAPANEWON PONJONG
40	KAPANEWON RONGKOP

41	KAPANEWON SEMIN
42	KAPANEWON NGAWEN
43	KAPANEWON GEDANGSARI
44	KAPANEWON SAPTOSARI
45	KAPANEWON GIRISUBO
46	KAPANEWON TANJUNGSARI
47	KAPANEWON PUWOSARI

Dalam melaksanakan Program Pengembangan Statistik Daerah didukung oleh kegiatan Pengelolaan Data dan Statistik Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan hasil kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2025, kegiatan pencetakan dokumen hasil kerjasama dengan BPS tidak dilaksanakan, dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pemenuhan kewajiban kebutuhan dasar anggaran yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam mendukung Gunungkidul Smart City (kabupaten/kota cerdas) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah membuat pedoman pengelolaan data dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul. Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah data-data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Maksud penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu untuk mewujudkan data pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, lengkap, akuntabel, serta digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah baik oleh masyarakat umum, Pemerintah Daerah, dan Instansi Vertikal.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam penyebaran informasi antara lain :

1) Kegiatan DOPADU (Data Olahan Per Sektor Terpadu)



Gambar III.11 Kegiatan DOPADU (Data Olahan Per Sektor Terpadu)

2) Bimtek EPSS



Gambar III.12 Bimtek EPSS

### 3) Evaluasi SDI



Gambar III.13 Evaluasi SDI

### 4) Kegiatan Tim Berisik (Berbincang Asik Statistik)



Gambar III.14 Kegiatan Tim Berisik (Berbincang Asik Statistik)

#### **Permasalahan :**

1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Perangkat Daerah yang memiliki pemahaman dan kompetensi dalam pengelolaan data statistik sektoral masih terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas pengelolaan dan penyajian data.

- Pemanfaatan aplikasi statistik sektoral belum berjalan secara optimal, baik dari sisi penggunaan fitur, kelengkapan pengisian data, maupun konsistensi pembaruan data oleh Perangkat Daerah.

**Solusi :**

- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Statistik Sektoral secara berkala bekerja sama dengan BPS Kabupaten Gunungkidul, guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah dalam pengelolaan, pengolahan, dan penyajian data statistik sektoral.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi DOPADU (Data Olahan Per Sektor Terpadu) sebagai sistem integrasi data sektoral, sehingga seluruh data dapat dikelola dalam satu platform yang terpusat, terstandar, dan saling terintegrasi antar Perangkat Daerah.

**4. Evaluasi Persandian untuk Pengamanan Informasi**

Persentase layanan keamanan informasi merupakan indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi. Capaian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Evaluasi Pencapaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase layanan keamanan informasi	100	80%	100	125	Sangat Tinggi	90 %	111,11
	Rata rata Capaian Indikator Program				125		90	111,11

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= \frac{\sum \text{PD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website yang menerima layanan keamanan informasi}}{\sum \text{PD PD/Pejabat/Sistem/Aplikasi/Website}} \times 100 \% \\
 &= \frac{100+100+100+100+100}{5} \times 100 \% \\
 &= \frac{500}{5} \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

1. Sosialisasi Keamanan dan Pengamanan Informasi

$$\frac{47 \text{ OPD}}{47 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

2. Penetration Test

$$\frac{47 \text{ OPD}}{47 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

3. Counter Surveillance (CS)

$$\frac{47 \text{ OPD}}{47 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

4. Pendampingan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

$$\frac{47 \text{ OPD}}{47 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

5. Pengamanan dan Kirim Terima Berita

$$\frac{47 \text{ OPD}}{47 \text{ OPD}} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi kinerja tahun 2025 sama dengan capaian kinerja tahun 2024 yaitu 100% karena pada tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Renstra 2021-2026 dengan indikator sama dengan tahun 2024 sehingga capaian realisasinya dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dibandingkan realisasi tahun 2024, pencapaian kinerja tahun 2025 stabil pada angka yang sama dari 100% menjadi 100%, dikarenakan jumlah OPD yang menerima layanan keamanan informasi jumlahnya tetap karena dilaksanakannya Counter Surveillance (CS) atau sterilisasi ruangan pada semua lokasi yang seharusnya dilakukan Counter Surveillance (CS). Sedangkan untuk pendampingan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada tahun 2025 masih tetap 47 atau seluruh OPD dan 18 Kapanewon, Perangkat Kalurahan dan Puskesmas. Penerbitan tanda tangan elektronik dilaksanakan karena adanya perubahan pejabat disebabkan mutasi dan promosi jabatan.

Layanan keamanan informasi yang dilaksanakan adalah :

1. Sosialisasi keamanan dan keamanan informasi
2. IT Assesment (Penetration Test)
3. Counter survailenve / Operasi Siaga Kontra Pengindraan
4. Pendampingan pemanfaatan sertifikat elektronik
5. Pengamanan dan kirim terima berita

Dalam melaksanakan program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi dengan sub kegiatan :

1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Kegiatan yang dilaksanakan :**

1. Forkomsanda DIY



Gambar III.15 Forkomsanda DIY

## 2. Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Perangkat Daerah



Gambar III.16 Penerbitan Tanda Tangan Elektronik Perangkat Daerah

## 3. Bimtek Jaring Komunikasi Sandi bagi admin Perangkat Daerah



Gambar III.17 Bimtek Jaring Komunikasi Sandi bagi admin Perangkat Daerah

Sedangkan Kegiatan Counter Surveillance dan CSIRT, dokumen berupa gambar atau foto tidak dapat dipublikasikan karena bersifat rahasia.

Meskipun realisasi mencapai 100% akan tetapi masih ada beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pengamanan informasi diantaranya :

Permasalahan :

1. Belum semua OPD memahami pentingnya pengamanan data dan informasi
2. SDM yang menguasai pengamanan informasi terbatas
3. SDM yang menguasai teknik Pen-Test belum ada di Kabupaten Gunungkidul.
4. Banyaknya aplikasi yang harus di Pen-Test, baru aplikasi pada 47 OPD yang di Pen-Test belum termasuk aplikasi yang ada di Kalurahan, Puskesmas dan Sekolah
5. Belum memiliki perangkat untuk kegiatan Counter Surveillance.

Solusi :

1. Sosialisasi secara berkala dan berkelanjutan kepada OPD.
2. Melakukan kerjasama dengan BSSN dan BSRI, baik sebagai narasumber maupun pelaksanaan Pen-Test yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
3. Memprioritaskan pelaksanaan Pen-Test pada aplikasi yang memiliki kerawanan terhadap gangguan.
4. Menjalin kerjasama dengan UTP yang telah memiliki peralatan dan personil untuk kegiatan Counter Surveillance.
5. Melaksanakan sosialisasi dan penerbitan sertifikat elektronik kepada seluruh OPD

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran**

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Tersedia SDM kompeten dan tersertifikasi, namun jumlahnya masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan layanan TIK yang terus meningkat.
2. Infrastruktur TIK telah tersedia dan mendukung layanan utama, namun masih terdapat keterbatasan (area blankspot) pada wilayah tertentu.
3. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), menjadi penghambat dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi dan komunikasi yang efektif
4. Literasi digital yang masih rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif.

5. Kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan usia.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Tools/Aplikasi untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Berkolaborasi dengan swasta melalui program CSR untuk menyediakan internet Publik di titik blankspot
3. Memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital untuk masyarakat, memfokuskan pada kemampuan memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab melalui media yang dikelola Dinas Kominfo baik melalui radio, youtube, media sosial, maupun melalui komunitas – komunitas yang sudah terbentuk, diantaranya Kelompok Informasi Masyarakat maupun Forum Humas
4. Membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Humas, Forum Influencer
5. Optimalisasi koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID (PLID) utama dan PPID (PLID) pelaksana Perangkat Daerah
6. Untuk meningkatkan kesadaran, kemudahan akses, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan aduan SP4N LAPOR, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, diantaranya menggunakan media yang dikelola pemerintah melalui Dinas Kominfo, selain itu juga melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dalam menyebarkan informasi tentang SP4N-LAPOR!

### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sudah ada kebijakan terkait Pengelolaan TIK;
2. Kolaborasi dan sinergitas antar bidang sudah terbangun dengan baik
3. Komunikasi dengan Perangkat Daerah/Lembaga lain terjalin dengan baik
4. Tersedianya SDM yang kompeten dan tersertifikasi meski masih terbatas jumlahnya
5. Meskipun masih ada beberapa titik *blankspot*, namun ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur TIK yang ada dapat dioptimalkan untuk penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat kepada publik.

6. Kerjasama yang baik dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, termasuk media online, membantu dalam menyebarkan informasi ke berbagai segmen masyarakat dengan lebih efektif.
7. Penggunaan website, media sosial, dan platform digital lainnya sebagai sarana penyampaian informasi dapat meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses informasi oleh masyarakat
8. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Padukuhan di tiap – tiap Kapanewon.

## Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1. Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKS/32 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Dinas Kominfo mendapatkan nilai 80,86 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel III.9 Capaian Sasaran  
Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No	Sasaran.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	80,75	80,86	100,13	Predikat A

Capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 adalah 80,86, dengan target 80,75 maka capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD adalah 100,13%. Capaian kinerja sasaran sudah melampaui target yang ditetapkan. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kominfo Tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kominfo untuk perbaikan implementasi SAKIP di Dinas Kominfo .Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel III.10 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1	Perencanaan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perbaikan rumusan hasil (indikator kinerja) pada tata Kelola perencanaan selanjutnya sehingga bisa menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan memenuhi kriteria SMART</li> <li>2. Menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan rumusan hasil (indikator kinerja) pada tata Kelola perencanaan selanjutnya sehingga bisa menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan memenuhi kriteria SMART, akan ditindaklanjuti pada dokumen perencanaan yang akan disusun dan ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan kabupaten melalui perbaikan Renstra PD.</li> <li>b. Dalam menetapkan target Perencanaan Kinerja yang akan datang akan dilaksanakan berdasarkan rumus : dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis dengan mempertimbangkan capaian hasil tahun sebelumnya melalui reviu Renstra PD 2025-2029..</li> </ol>
2.	Pengukuran Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mereviu kelengkapan komponen indikator IKU sehingga memiliki definisi operasional dan formulasi yang relevan serta mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.</li> <li>b. Menggunakan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian rencana aksi dan aktivitas dalam mencapai kinerja.</li> <li>c. Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja</li> </ol>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan reviu kelengkapan komponen indikator IKU yang akan dilaksanakan pada Renstra periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan dengan menyesuaikan IKU Bupati.</li> <li>2. Dalam penyusunan rencana aksi dan aktivitas selanjutnya akan menggunakan hasil pengukuran kinerja. Penyusunan target kinerja berdasarkan hasil reviu Renstra.</li> <li>3. Melakukan Rapat Koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja akan dilaksanakan</li> </ol>

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
			secara rutin per triwulan.
3.	Pelaporan Kinerja	<p>a. Menginternalisasikan pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi dalam laporan kinerja.</p> <p>b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.</p>	<p>a. Melakukan internalisasi dan sosialisasi pentingnya kepemilikan terhadap kinerja pada seluruh pegawai serta melibatkan seluruh pegawai dalam penyajian informasi maupun mengakses informasi melalui rakor internal setiap 3 bulan.</p> <p>b. Menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai dasar penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja dengan melakukan <i>sharing</i> informasi antar bidang dan sekretariat untuk melaksanakan kolaborasi kegiatan juga optimalisasi pemanfaatan grup WhatsApp (WA) untuk <i>sharing</i> informasi.</p>
4	Evaluasi Kinerja	Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal tahun 2023 yang terkait penyelarasan dokumen perencanaan serta perbaikan rumusan indikator sasaran sesuai tata kala perencanaan periode berikutnya.	Akan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Internal tahun 2023 yang terkait penyelarasan dokumen perencanaan dan perbaikan rumusan indikator sasaran sesuai tata kala perencanaan periode berikutnya serta Langkah-langkah lain yang diperlukan.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat dan capaian kinerja Dinas Kominfo lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 yang sebesar 80,42 dengan kategori A.

Realisasi kinerja 80,86 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan realisasi pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun 2025 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

No	Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
			2022	2023	2024	2025		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	79,20	78,60	80,42	80,86	81	97,04

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.12**  
**Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	100,13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	94,34	94,34 Sangat tinggi

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp 3.939.916.514,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 3.716.811.515,00 (94,34%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 223.104.999 (5,66%).

**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD**

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai AKIP PD	80,75	80,86	100,13	3.939.916.514	3.716.811.514	94,34	5,66

Permasalahan:

1. Adanya efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat, sehingga harus merencanakan ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pada saat kegiatan berjalan sering terdapat masalah teknis sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.
3. Dinas Kominfo mempunyai beberapa rekening untuk pembayaran listrik, air telpon, yang tidak dapat diprediksi besarnya biaya tagihan karena ada beberapa meteran listrik yang terletak di lapangan.

Solusi :

1. Melakukan pergeseran obyek dan rincian obyek belanja, serta anggaran kas.
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan.

Permasalahan:

1. Beberapa sub kegiatan capaian kinerja dibawah 90%, permasalahannya diantaranya sebagai berikut :
  - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Anggaran makan dan minum rapat tidak terserap karena kegiatan rapat dilaksanakan secara mendadak dan singkat, sehingga tidak memenuhi persyaratan administrative dan waktu pemesanan konsumsi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

- b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratuan Perundang-undangan  
Realisasi biaya langganan surat kabar per bulan di bawah SHBJ.
- c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Perjalanan Dinas hanya satu hari sehingga anggaran penginapan tidak terpakai
  - Anggaran tiket memakai anggaran standar pesawat, sedangkan realisasi tiket yang dipergunakan untuk perjalanan lebih banyak menggunakan kereta api, bus atau kendaraan dinas/mobil.
  - Acara Pers Tour dianggarkan untuk 40 orang sedangkan yang mengikuti kegiatan hanya 30 orang.

## B. Capaian Kinerja Lainnya

Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengampu SDG's, hasil yang dicapai seperti tabel berikut :

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline)	Capaian									Status
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DISKOMINFO		n/a		n/a	43,23	51,01	57,45	61,14	65,36	65,81	88,31	Sumber Data : BPS
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO		n/a		n/a	58,15	57,38	56,88	57,84	73,37	72,3	62,47	Sumber Data : BPS
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO		69		n/a	72,93	72,79	73,02	72,55	72,59	72,59	-	Sumber Data : BPS (Data tidak tersedia)
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO		n/a		n/a	58,15	57,38	56,88	57,84	73,37	72,3	62,47	Sumber Data : BPS
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO		43,23		n/a	43,23	51,01	57,45	61,14	65,36	65,81	72,59	Sumber Data : BPS
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DISKOMINFO		0		47	48	48	48	48	48	48	47	sumber data : Kominfo
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalabar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DISKOMINFO		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	70	70	70	-	Sumber Data : BPS (Data tidak tersedia)
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DISKOMINFO		n/a		n/a	72,93	72,79	73,02	72,55	72,59	72,59	-	Sumber Data : BPS (Data

														tidak tersedia)
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DISKOMINFO		43,23		n/a	43,23	51,01	57,45	61,14	65,36	65,81	-	Sumber Data : BPS
17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	DISKOMINFO		96,97		90	96,97	92,86	97	100	100	100		Sumber Data : BPS
17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	DISKOMINFO		96,97		80	96,97	96,75	74	100	100	100		Sumber Data : BPS
17.18.1. (c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	DISKOMINFO		n/a		1	6	6	6	11	9	9		Sumber Data : BPS
17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DISKOMINFO		27.048		20	20.337	26.842	28.072	17.120	24.538	24.538	10.855	Sumber Data : BPS
17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	DISKOMINFO		94,25		80	94,25	84,38	100	100	100	100	100	Sumber Data : BPS

### ***Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan***

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan Pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan Pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dan program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah tetap responsive dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender. Dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, control dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan Perangkat Daerah.

Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget/Statement) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kominfo, antara lain:

1. Penyediaan layanan jaringan internet yaitu 32 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 19 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 3 Rumdin, 1 LPPL, 72 SD, 34 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip yang disediakan untuk masyarakat termasuk didalamnya adalah kelompok rentan afirmatif gender.
2. Pengelolaan website atau aplikasi yang mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan kemudahan mengakses layanan Kesehatan.
3. Aplikasi Pendataan Kemiskinan (<https://sikab.gunungkidulkab.go.id/>)
4. Aplikasi untuk mendukung pemasaran produk UMKM (<https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/komoditas-kldi/D65>) dan Marketplace produk UMKM, (<https://umkm.gunungkidulkab.go.id/>)
5. **Layanan Kesehatan/Jaminan Kesehatan Masyarakat** (<https://sikda.gunungkidulkab.go.id/>)
6. Keterlibatan perempuan dalam bimtek dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Kominfo diantaranya Bimtek KIM, Bimtek Jurnalistik, Bimtek Statistik dan Bimtek Keamanan Informasi.

### C. Efisiensi Anggaran

---

Anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp18.961.331.714,00 dan telah menyerap anggaran sebesar

Rp18.620.648.288,00 atau 98,20%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.340.683.426,00.

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel 3.13 berikut:

Tabel III.13 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.939.916.514</b>	<b>3.716.821.515</b>	<b>94,34</b>	<b>223.094.999</b>	<b>5,56</b>
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.456.500	3.556.500	79,80	900.000	20,20
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.342.981.810	2.215.173.055	94,55	127.808.755	5,45
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.915.673	71.971.353	98,31	3.043.320	1,69
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.451.995	307.870.189	83,70	59.581.806	11,30
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.400.000	292.814.958	99,46	1.585.042	0,54
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.356.936	497.187.633	95,00	26.169.303	5,00
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.353.600	328.347.327	98,79	4.006.273	1,21
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.907.958.200</b>	<b>1.894.683.763</b>	<b>99,30</b>	<b>13.274.437</b>	<b>0,70</b>
1)	<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.907.958.200</b>	<b>1.894.683.763</b>	<b>99,30</b>	<b>13.274.437</b>	<b>0,70</b>
	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	12.650.218.000	12.558.588.566	99,28	91.629.434	0,71
1)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.650.218.000	12.558.588.566	99,28	91.629.434	0,71
	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>119.732.000</b>	<b>109.552.000</b>	<b>91,50 %</b>	<b>10.180.000</b>	<b>8,50</b>
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<b>119.732.000</b>	<b>109.552.000</b>	<b>91,50 %</b>	<b>10.180.000</b>	<b>8,50</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi (%)
	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>343.507.000</b>	<b>341.002.444</b>	<b>99,27%</b>	2.504.556	0,73
1)	Penyelenggaran Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<b>240.602.000</b>	<b>238.489.444</b>	<b>99,12 %</b>	2.112.556	0,88
2)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	102.905.000	102.51300	99,62 %	392.000	0,38
	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	0	0
1)	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	0	0
	<b>Jumlah Keseluruhan</b>	<b>18.961.331.714</b>	<b>18.620.648.288</b>	<b>98,20%</b>	<b>340.683.426</b>	<b>1,80</b>

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

Anggaran total Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 adalah Rp 18.961.331.714,00. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar Rp 18.620.648.288,00 atau 99,20% dari total anggaran yang dialokasikan. Sisa anggaran adalah Rp 340.683.426,00 atau 1,80% dari total anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel 3.11 berikut :

**Tabel 3.11**  
**Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025**

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
<b>1.</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	<b>1.907.958.200</b>	<b>1.894.683.763</b>	<b>99,30</b>	<b>13.274.437</b>	<b>0,70</b>
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.907.958.200	1.894.683.763	99,30	13.274.437	0,70
<b>2.</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	<b>12.650.218.000</b>	<b>12.558.588.566</b>	<b>99,28</b>	<b>91.629.434</b>	<b>0,71</b>
1)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.650.218.000	12.558.588.566	99,28	91.629.434	0,71

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
3.	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>119.732.000</b>	<b>109.552.000</b>	<b>91,50 %</b>	<b>10.180.000</b>	8,50
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	119.732.000	109.552.000	91,50 %	10.180.000	8,50
4.	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>343.507.000</b>	<b>341.002.444</b>	<b>99,27%</b>	2.504.556	0,73
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	240.602.000	238.489.444	99,12 %	2.112.556	0,88
2)	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	102.905.000	102.51300	99,62 %	392.000	0,38
5	<b>Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan</b>	0	0	<b>0 %</b>	0	0
1)	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	0	0	<b>0 %</b>	0	0
6)	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.393.916.514</b>	<b>3.716.821.515</b>	<b>94,34</b>	<b>223.094.999</b>	<b>5,66</b>
1)	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.456.500	3.556.500	<b>79,80</b>	900.000	<b>20,20</b>
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,342,981.810	2.215.173.055	94,55	127.808.755	<b>5,45</b>
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.915.673	34.326.853	98,31	3.043.820	<b>1,69</b>
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.451.995	307.870.189	83,70	59.581.806	11,30
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.400.000	292.814.958	99,46	1.585.042	0,54
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	523.356.936	497.187.633	95,00	26.169.303	5,00
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	332.353.600	328.347.327	98,79	4.006.273	1,21
<b>Jumlah Keseluruhan</b>		<b>18.961.331.714</b>	<b>18.620.648.288</b>	<b>98,20%</b>	<b>340.683.426</b>	<b>1,80</b>

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.14 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/Pendukung	Kinerja			Anggaran			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Efisiensi (RP)
1.	Kualitas pelayanan komunikasi dan informatika pemerintah meningkat	87,78	140,95	203,52	15.409.937.122	15.070.447.352	97,73	339.489.770
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80,75	80,86	100,13	3.939.916.514	3.716.821.515	94,34	223.094.999
					18.961.331.714	18.620.648.288	98,20	340.683.426
	Jumlah Belanja Program Utama				15.021.415.200	14.903.826.773	117.588.427	0,78
	Jumlah Belanja Program Penunjang				3.939.916.514	3.716.821.515	94,34	223.094.999

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul, 2024

\*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp 2121.526.000,00 terealisasi Rp2.027.681.670,00 atau 95,58% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp93.844.330,00 atau 4,42% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa
- Efisiensi belanja perjalanan dinas
- Efisiensi honor narasumber
- Belanja yang tidak direalisasikan karena sudah tercukupi sesuai Kebutuhan

#### D. Inovasi

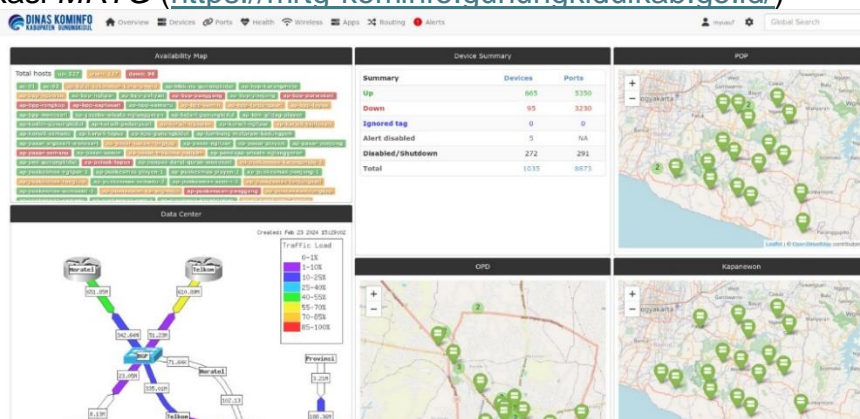
Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat

bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. JARIK AGUNG (Jaringan Internet Kalurahan Agawe Ungguling Gunungkidul) merupakan sebuah inovasi berupa strategi percepatan Pembangunan jaringan internet untuk penyelesaian permasalahan Blank Spot dan penyediaan Layanan wifi publik. Kegiatan ini diawali dari pembentukan tim teknis, penyusunan sekema topologi jaringan, sekema kolaborasi pemerintah dan BUMN/Swasta, strategi pembiayaan kegiatan dan percepatan Pembangunan jaringan internet. Kegiatan ini di laksanakan oleh Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul:

JARIK AGUNG didukung dengan 3 aplikasi yang berbeda fungsinya seperti berikut ini :

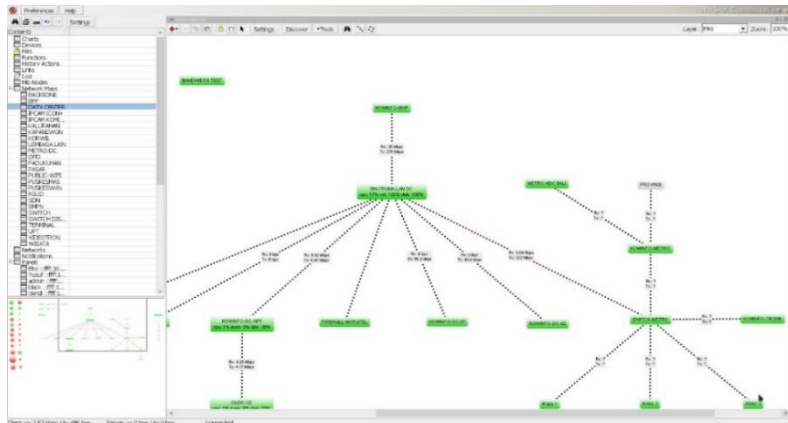
Instrumen pendukung Pengelolaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi  
Data aplikasi MRTG (<https://mrtg-kominfo.gunungkidulkab.go.id/>)



Sumber : <https://mrtg-kominfo.gunungkidulkab.go.id/>

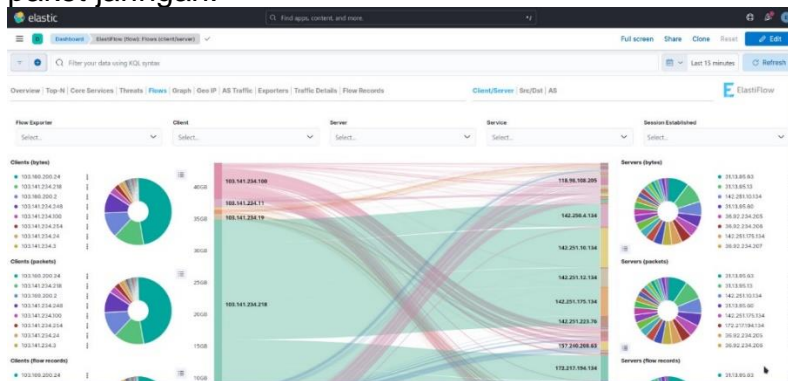
Gambar III.18. MRTG

Aplikasi The Dude merupakan aplikasi berbasis desktop yang digunakan untuk pemantauan jaringan.



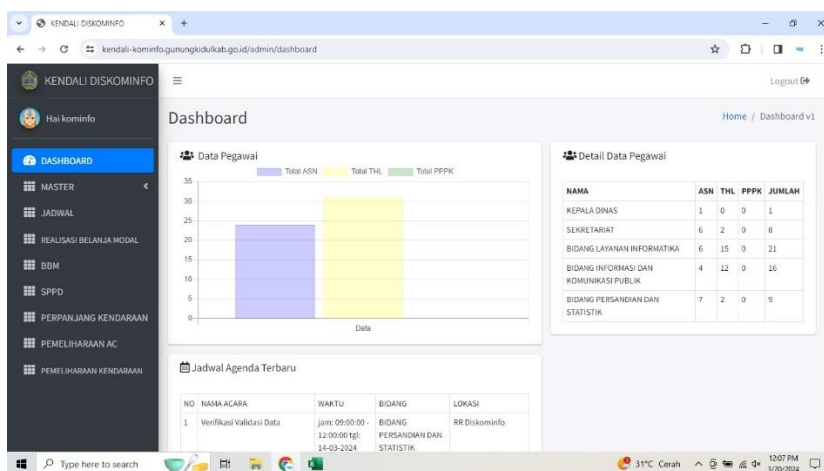
Sumber: Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo  
 Gambar III.19. Aplikasi The Dude

Aplikasi *Elasticsearch* merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring flow paket jaringan.



Sumber: Bidang Layanan Informatika Dinas Kominfo  
 Gambar III.20. Aplikasi *Elasticsearch*

## 2. Aplikasi Pengendalian SPPD dan BBM



Gb III.21. Aplikasi SPPD dan BBM

## BAB IV

# PENUTUP

### BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

### A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Pertama*, walaupun sasaran kinerja “Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Meningkatkan” telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan masih adanya *blankspot* baik di wilayah kalurahan, padukuhun maupun di obyek wisata.
2. *Kedua*, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
3. *Ketiga*, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

### Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Kurangnya SDM Pengelola Jaringan Komunikasi
2. Kurangnya infrastruktur dan Sarana Pendukung
3. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), menjadi penghambat dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi dan komunikasi yang efektif
4. Literasi digital rendah mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara efektif.
5. Kesenjangan akses dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi antar wilayah atau kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi, pendidikan, dan usia.
6. Dalam pengelolaan keterbukaan informasi badan publik Pemkab Gunungkidul beserta perangkat daerahnya, kurangnya kapasitas pengelola PPID Pelaksana dalam menyediakan bukti dukung dokumentasi informasi publik sehingga ada Kesenjangan digital masyarakat.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan Tools/Aplikasi untuk mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Berkolaborasi dengan swasta melalui program CSR untuk menyediakan internet Publik di titik blankspot
3. Menyelenggarakan program kegiatan yang mendukung percepatan transformasi digital dan penguatan literasi digital dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan program kota cerdas (Smart City).
4. Memberikan edukasi dan peningkatan literasi digital untuk masyarakat, memfokuskan pada kemampuan memilah informasi dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab melalui media yang dikelola Dinas Kominfo baik melalui radio, youtube, media sosial, maupun melalui komunitas – komunitas yang sudah terbentuk, diantaranya Kelompok Informasi Masyarakat maupun Forum Humas
5. Membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama meningkatkan kualitas informasi dan komunikasi publik melalui Kelompok Informasi Masyarakat, Forum Humas, Forum Influencer
6. Optimalisasi koordinasi dan peningkatan kapasitas PPID (PLID) utama dan PPID (PLID) pelaksana Perangkat Daerah dan Kalurahan.

7. Meningkatkan kesadaran, kemudahan akses, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan aduan SP4N LAPOR, diantaranya menggunakan media yang dikelola pemerintah melalui Dinas Kominfo, selain itu juga melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas lokal dalam menyebarkan informasi tentang SP4N-LAPOR!

### **Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran**

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sudah ada kebijakan terkait Pengelolaan TIK;
2. Kolaborasi dan sinergitas antar bidang sudah terbangun dengan baik
3. Komunikasi dengan Perangkat Daerah/Lembaga lain terjalin dengan baik
4. Tersedianya SDM yang kompeten dan tersertifikasi
5. Ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur TIK sehingga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat kepada publik.
6. Kerjasama yang baik dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, termasuk media online, membantu dalam menyebarkan informasi ke berbagai segmen masyarakat dengan lebih efektif.
7. Penggunaan website, media sosial, dan platform digital lainnya sebagai sarana penyampaian informasi dapat meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses informasi oleh masyarakat
8. Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Padukuhan di tiap – tiap Kapanewon.

### **B. Langkah Perbaikan Kinerja**

---

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan mendorong inovasi di bidang TIK dengan membangun ekosistem yang mendukung pengembangan teknologi baru dan meningkatkan kolaborasi dengan akademisi, industri, dan pemerintah dalam pengembangan teknologi.
2. Mengembangkan infrastruktur TIK yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam upaya mendukung penggunaan teknologi informasi yang semakin masif.
3. Menjembatani kesenjangan digital masyarakat dengan meningkatkan akses internet publik serta meningkatkan literasi digital dimana akses terhadap teknologi tidak merata di seluruh lapisan masyarakat.

4. Menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan kota cerdas (Smart City) oleh masing masing Perangkat Daerah.
5. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi penyaji dan pengguna sistem informasi
6. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia dalam memantau dan menangani insiden keamanan informasi dengan melakukan bimbingan teknis, workshop atau kegiatan lain dalam upaya pelaksanaan transmormasi digital.
7. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk aktif menggunakan platform aduan resmi melalui SP4N LAPOR.
8. Meningkatkan Literasi Digital masyarakat sehingga mampu mengidentifikasi kebenaran informasi dengan menggalakkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).

# LAMPIRAN

- 1.Perjanjian Kinerja Th 2025 beserta perubahannya*
- 2.Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3.Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*